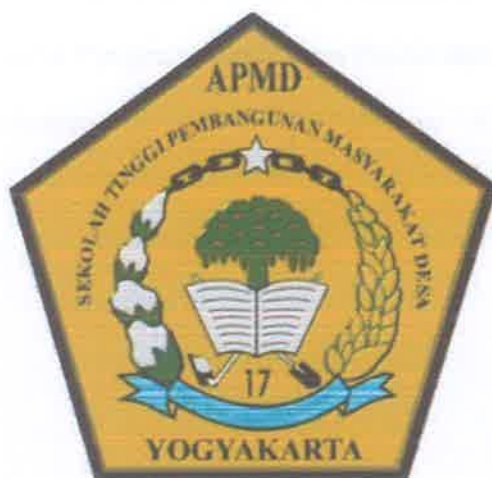


SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI DESA KENUAL KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**



Disusun Oleh :

JHON ETDA SABJANOBA

20520119



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI DESA KENUAL KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata (1)

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



Disusun Oleh :

JHON ETDA SABJANOBA

20520119

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :




Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2024

Jam : 09.00-10.00 WIB

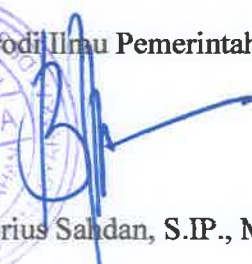
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. Ketua Penguji/Pembimbing	
2. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat Penguji Samping I	
3. Minardi, S.IP., M.Sc Penguji Samping II	



Mengetahui,


Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : JHON ETDA SABJANOBA

Nomor Mahasiswa : 20520119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan Sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “**Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang**” ini sungguh hasil karya saya. Hal-hal yang bukan menjadi bagian dari karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum jelas pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Juli 2024



Yang Menyatakan

Jhon Etda Sabjanoba

JHON ETDA SABJANOBA
20520119

HALAMAN MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

(Yeremia 29:11)

“Rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya Jalan-Ku dari jalanmu dan Rancangan-Ku dari rancanganmu”

(Yesaya 55:8-9)

“Buatlah rencana hidupmu sendiri atau selamanya jadi bagian dari rencana hidup orang lain”

(Jhon Etta Sabjanoba)

“Lakukanlah hal yang membuatmu senang dan membanggakan diri tetapi ingat semua pasti ada dampak dan akibatnya”

(Jhon Etta Sabjanoba)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tanpa bimbingan dan penyertaan-Nya, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini merupakan hasil dari usaha dan kerja keras yang tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang saya hormati dan banggakan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan yang tiada henti selama perjalanan akademik saya, di antaranya yaitu:

1. Kepada orang tua saya : Bapak Daniel dan Ibu Etik Hartatik yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Tenaga dan dana yang diberikan selama saya menempuh pendidikan sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
2. Kepada saudara kandung : Abang David, Abang Yoyon, Kak Ica, dan Adik Feli yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya dari awal saya kuliah sampai kepada saya menyelesaikan pendidikan saya.
3. Kepada dosen pembimbing : Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si., yang sudah memberikan bimbingan secara luar biasa. Banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dari beliau. Kesabaran, kegigihan dan semangat yang diberikan kepada saya selama penulisan skripsi menjadi motivasi yang sangat berkesan bagi saya.

4. Kepada STPMD “APMD” Yogyakarta yang menjadi tempat saya menempuh ilmu selama penyelesaian Pendidikan S1 menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam saya berproses.
5. Kepada Pemerintah Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi yang bersedia dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Sambutan yang hangat dari Pemerintah Desa Kenual membukakan jalan kepada saya dapat melakukan penelitian dengan lancar dan baik.
6. Kepada Youra Angella Claudia yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam penulisan skripsi.
7. Kepada kerabat terdekat saya diperantauan : Garib, Reinhart, Eky, Jothsia, Ricky, Steven, Marshel dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan. Terimakasih sudah menjadi saudara selama diperantaun dan menjadi orang terdekat dalam proses penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ““Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang” dengan baik. Skripsi menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran yang bermanfaat. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan dari banyak pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si., selaku dosen pembimbing dalam proses penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat, selaku dosen penguji I dan Bapak Minardi, S.IP., M.Sc., selaku dosen penguji II dalam ujian skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang sudah memberikan ilmu selama penulisan skripsi.

6. Pemerintah dan masyarakat Desa Kenual yang telah memberikan tempat kepada peneliti selama melakukan penelitian.
7. Orang tua, saudara dan kerabat yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar menjadi pedoman bagi peneliti di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Peneliti

Jhon Etda Sabjanoba

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. <i>Literature Review</i>	11
G. Kerangka Konseptual	20
1. Kapasitas Pemerintah Desa.....	20
2. Kebijakan Pemerintah Desa.....	25
3. Modal Sosial	26
4. Pengentasan Kemiskinan	29
H. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Lokasi, Objek dan Subjek Penelitian	36
3. Teknik Pengumpulan Data	40
4. Teknik Analisis Data.....	43
BAB II DESKRIPSI DESA KENUAL	45

A. Sejarah Desa Kenual	45
B. Profil Desa Kenual	52
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan	63
B. Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
RINGKASAN DATA	80
PEDOMAN WAWANCARA.....	81
LAMPIRAN FOTO	84
SURAT PETUNJUK DOSEN PEMBIMBING.....	85
SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH DESA KENUAL.....	86
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nama Dusun dan Jumlah RT	45
Tabel 2. 2 Data Kepala Desa Kenual Menurut Periode	46
Tabel 2. 3 Tabel Organisasi Pemerintah Desa Kenual.....	47
Tabel 2. 4 Struktur organisasi BPD.....	52
Tabel 2. 5 Data Penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kenual.....	54
Tabel 2. 6 Data Masyarakat Desa Kenual menurut Agama Kepercayaan	55
Tabel 2. 7 Data Masyarakat Desa Kenual menurut Etnis	56
Tabel 2. 8 Data masyarakat berdasarkan Mata Pencaharian.....	58
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	59
Tabel 2. 10 Jumlah Penerima Bantuan.....	60

INTISARI

Desa Kenual, terletak di kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, merupakan salah satu desa di pusat kota kabupaten. Kabupaten Melawi memiliki sumber daya alam melimpah, perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan peternakan yang luas, tetapi angka kemiskinan tetap tinggi di 11,44 persen, menjadikannya kabupaten termiskin di Kalimantan Barat. Desa Kenual sendiri termasuk desa termiskin di kabupaten tersebut. Kemiskinan desa menjadi isu penting yang menghambat pembangunan nasional. Desa miskin membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pemerintah Desa Kenual perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas pemerintah Desa Kenual dalam mengentaskan kemiskinan dan hubungannya dengan *governability* pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan peneliti memilih informan yang dianggap mampu dan berkaitan dengan fokus dari penelitian. Informan dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Penerima Bantuan, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian berlokasi di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Untuk teknis dalam menganalisis data memakai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, masih belum optimal. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kapasitas, dan koordinasi. Kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat desa kurang terfokus, dan penggunaan dana desa tidak selalu efektif. Kurangnya rencana strategis dan pemanfaatan potensi masyarakat, seperti kearifan lokal dan gotong royong, juga menjadi hambatan utama.

Kata kunci: Kapasitas, *Governability*, kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Melawi merupakan salah satu Kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003. Ibu kotanya berada di Kecamatan Nanga Pinoh, memiliki luas wilayah 10.644 km² yang sebagian besar adalah wilayah perbukitan. Secara administratif kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan 169 Desa dan 603 Dusun. Pemekaran kecamatan dan desa terakhir pada tahun 2008 yaitu dari 7 kecamatan menjadi 11 kecamatan dan dari 82 desa menjadi 169 desa. Kabupaten ini juga memiliki potensi yang sangat strategis dan berpotensi sejahtera sebab memiliki sumber daya alam yang melimpah, perkebunan kelapa sawit, pertanian dan peternakan yang luas. Tapi data BPS menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 11,44 persen dan Kabupaten Melawi menduduki posisi teratas sebagai Kabupaten termiskin di Kalimantan Barat. Melihat permasalahan diatas maka harus dilakukannya pengentasan kemiskinan yang harus dijadikan prioritas bagi pemerintah dan berbagai pihak gunanya untuk mendapatkan hidup hajat orang banyak yang lebih sejahtera dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kemiskinan yang menjadi permasalahan bagi masyarakat di Kabupaten Melawi kini juga menjadi tantangan kehidupan bagi masyarakat di Desa Kenual. Desa Kenual adalah Desa yang memiliki sumber daya peternakan bahkan pertanian. Namun, dari jaman ke jaman pertanian dan peternakan hanya untuk memperpanjang hidup setiap rumah tangga dan minimnya kemampuan dalam

melihat peluang. Kondisi empiris yang bisa dilihat, ketidakberdayaan nya sumber daya manusia karena minimnya pendidikan yang mereka tempuh dahulu sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sebab standar penerimaan karyawan pekerjaan minimal tamat SMA. Sehingga budaya kemiskinan ini diturunkan satu generasi ke generasi berikutnya. Walaupun, bukan menjadi rahasia tapi Pemerintah Desa hanya fokus melakukan pembangunan yang lebih mengarah kepada Infrastruktur ketimbang mementingkan kepentingan pendidikan atau memtreatment masyarakat yang lemah akan ekonomi.

Rendahnya kapasitas pemerintah desa menyebabkan kemiskinan ini merajalela di Desa Kenual, bukan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi namun tidak adanya kemampuan pemerintah dalam memecahkan pengentasan terhadap kemiskinan. Kondisi empiris memperlihatkan bahwasanya Pemerintah Desa Kenual hanya mengandalkan bantuan tunai yang sumber dananya yang berbeda seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) yang bersumber dari dana Kementerian Sosial sedangkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bersumber dari Dana Desa. Hal ini tentu juga membantu setiap masyarakat dalam memberantas kemiskinan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tapi ini ada atas dasar perintah dari pemerintah pusat tanpa adanya inovasi dan terobosan.

Mengabaikan kebijakan tentang kemiskinan dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi masyarakat desa. Beberapa akibat yang mungkin timbul akibat kelalaian pemerintah desa dalam hal ini meliputi: pertumbuhan kemiskinan yang tidak terkendali, ketidakmerataan pembangunan, dan penurunan Kredibilitas pemerintah desa. Tanpa kebijakan yang efektif dan dilaksanakan dengan baik,

tingkat kemiskinan di desa dapat terus meningkat atau tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tanpa kebijakan yang efektif dan dilaksanakan dengan baik, tingkat kemiskinan di desa dapat terus meningkat atau tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam keberhasilan program-program desa. Pelimpahan wewenang dan tugas kepada pemerintah desa memungkinkan mereka menjalankan pemerintahan secara demokratis, menjunjung tinggi hak-hak rakyat, mengedepankan kepentingan rakyat, dan didukung oleh rakyat. Sehingga, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memberikan inovasi dan kreativitas dalam memberantas atau mengatasi kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang bertanggung jawab untuk memberikan inovasi dan kreativitas dalam memberantas atau mengatasi kemiskinan adalah pemerintah desa. Pemerintah Desa Kenual harus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi.

Pemerintah desa bertugas memberdayakan masyarakat serta melakukan pembangunan dan harus mempunyai program. Program adalah gabungan kegiatan nyata, terstruktur dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan sarana yang ditetapkan dalam bentuk perencanaan-perencanaan. Apabila Program yang berada di lingkup pemerintahan desa, maka sudah jelas program ini disusun atas dasar aspirasi masyarakat yang guna untuk memudahkan dari segala bidang pelayanan maupun operasional atas dasar

kepentingan rakyat. Seorang pimpinan yang ada di Desa harus bisa memilih program kerja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah organisasi yang menguntungkan. Sayangnya, banyak program-program yang ada di Desa tidak memiliki indikator prioritas atau program yang harus diselesaikan secara dahulu, programnya dapat dikategorikan sebagai prioritas program desa yang ditentukan bersama-sama masyarakat serta dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Hubungan antara pengentasan kemiskinan di desa dengan ilmu pemerintahan mencakup aspek penting salah satu adalah *Governability* atau kemampuan pemerintah dalam menangani setiap masalah yang terjadi di desa, *governability* mencakup beberapa hal penting yaitu: pertama Kebijakan Publik, Ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Penanggulangan kemiskinan di desa melibatkan proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, program-program sosial ekonomi, dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua; Administrasi Pemerintahan, Ilmu pemerintahan membahas tentang administrasi publik dan manajemen sumber daya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, penting untuk memiliki administrasi yang efektif untuk mengelola program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan memahami konsep-konsep dasar ilmu pemerintahan, pemerintah desa dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan kemiskinan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Desa Kenual harus memiliki program prioritas untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Meskipun bantuan seperti BLT, BST, dan PKH sudah diberikan, masyarakat masih

terjebak dalam masalah sosial yaitu kemiskinan. Solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah kebijakan penganggaran Dana Desa (DD) yang diberikan melalui APBN dan ditransfer melalui APBD, yang harus diprioritaskan untuk pembangunan daerah sesuai dengan potensi lokal di Desa Kenual. Pemerintah desa perlu menyusun program-program yang tepat sasaran dan berkelanjutan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan dan pelatihan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Melalui kebijakan penganggaran yang tepat dan program-program efektif, diharapkan kemiskinan di Desa Kenual dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Kegunaan DD bagi Desa adalah pendapatan utama yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah dibuat dan ditentukan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Musrenbang adalah forum diskusi seacara bersama dengan mendengar aspirasi dari berbagai macam pihak untuk mendapatkan legislasi dokumen RPJM Desa ke dalam Peraturan Desa dan wajib untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. DD harus dimanfaatkan Pemerintah Desa Kenual dalam penyerapan tenaga kerja di Desa khususnya warga yang miskin menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan yang tergolong miskin ekstrim setiap masyarakat di Desa.

Sedangkan kejadian di mana dana Desa di Desa Kenual tidak tepat sasaran, terutama dalam pengentasan kemiskinan desa, dana desa Kenual hanya terfokus untuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, atau bangunan umum dengan biaya yang jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Hal ini mengakibatkan

kurangnya alokasi dana untuk program-program yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan program-program sosial lainnya yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Kondisi empiris yang terjadi di Desa Kenual adalah DD hanya disalurkan sesuai kemauan pemegang kebijakan atau Kepala Desa sebagai koordinator perencanaan pembangunan. Namun, walaupun sudah dilakukan Musrenbang Desa seringkali output yang akan dilaksanakan berikut berbeda dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Sebab Pemerintah Desa hanya mengejar pencairan Dana Desa berikutnya tanpa memikirkan apa yang diperlukan masyarakat dan masalah yang terjadi di masyarakat Desa Kenual. Mengapa dikatakan seperti itu? karena DD tidak bisa dicairkan apabila APBDes belum selesai.

Desa Kenual, yang terletak di ibu kota Kabupaten Melawi, memiliki wilayah yang luas dan banyak dusun, sehingga Dana Desa (DD) yang diterima terbatas untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Walaupun DD tidak cukup untuk mendanai semua upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah desa tetap berusaha keras menyusun berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut. Sayangnya, perencanaan yang dilakukan masih belum memadai dan perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Keterbatasan dana sering kali menjadi kendala utama, tetapi pemerintah desa harus lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan serta mengelola dana yang ada. Dengan perencanaan yang lebih baik dan penggunaan dana yang lebih efisien, berbagai program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Melihat kondisi di atas, jelas bahwa kapasitas pemerintah Desa Kenual dalam merencanakan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi kemiskinan masih sangat minim. Padahal, salah satu tujuan utama dari pemberian Dana Desa adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa-desa. Jika kondisi ini dibiarkan, masalah kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan melalui dana dari Kementerian Sosial dan Dana Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan dana dengan lebih baik, serta mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan bagi warga, pengembangan usaha mikro, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Tanpa perencanaan yang matang dan upaya yang lebih komprehensif, kemiskinan di Desa Kenual akan sulit untuk diatasi.

Mengapa kapasitas pemerintah desa sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan dana desa? Karena dana desa harus dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Desa, bahkan dengan adanya DD menjadi modal awal Desa untuk melakukan pembangunan tanpa harus memikirkan sumber dana. Bahkan, kebijakan dana desa dapat membantu membangun infrastruktur serta mengembangkan potensi yang ada di Desa Kenual. Jika tidak adanya kapasitas atau kemampuan maka mimpi dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Kenual hanya angan-angan saja, bisa dikatakan cita-cita abadi yang akan dipertontonkan dari generasi satu sampai generasi yang akan diturunkan.

Dana Desa penting untuk mengatasi kemiskinan karena itu menunjukkan kemampuan desa dalam aspek responsive melihat keadaan yang terjadi di masyarakat. Sebab Desa sudah memiliki otoritas yaitu merancang Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melakukan pembangunan, menyelenggarakan pemerintah serta bertanggung jawab dalam perencanaan dalam menanggulangi kemiskinan secara otonom dan termasuk dalam pengelolaan keuangan dalam implementasi kebijakan. Pemberian itu juga bukan diberikan secara cuma-cuma namun untuk pemenuhan hak desa yang bertujuan untuk tumbuh dan berkembang desa serta peningkatan peran pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan yang merajalela. Maka daripada itu, apabila sebuah desa tidak memiliki program prioritas desa untuk mengatasi kemiskinan maka kemampuan bahkan kemauan desa dalam mewujudkan strategi yang diberikan pemerintah pusat untuk kemajuan desa pasti tidak berhasil karena tidak mempunyai visi dan misi pembangunan yang jelas.

Dukungan dana yang diberikan Pemerintah Pusat, dapat diartikan jika tidak ditunjang dengan kapasitas atau kemampuan dari perangkat Desa terutama Kepala Desa. Sebab, kepala desa yang menjadi koordinator dari jalannya program mulai dari perencanaan sampai kepada proses pelaksanaan. Kepala Desa juga harus menentukan arah tujuan prioritas program yang akan diselesaikan secara terdahulu supaya menjadi bukti pengabdian kepada seluruh hajat orang banyak yang tinggal di Desa.

Terdapat sisi positif yang patut diapresiasi di Desa Kenual, meskipun tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih signifikan. Beberapa keluarga di desa ini telah berhasil menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa usaha dan kerja keras dapat menghasilkan

keberhasilan yang menginspirasi. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi keluarga tersebut, tetapi juga membuka peluang yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Dukungan yang konsisten dan tekad yang kuat dapat membawa perubahan besar meskipun dalam kondisi keterbatasan. Keberhasilan ini mencerminkan potensi dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun fokus utama penelitian ini pada kemiskinan di Desa Kenual, sehingga pencapaian-pencapaian positif ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan besar, ada juga harapan dan untuk perubahan yang lebih baik melalui upaya individu.

Permasalahan yang peneliti ambil di Desa Kenual bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pengentasan Kemiskinan yang ada di Desa Kenual yang mempunyai tanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan dana desa yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat. Maka daripada itu, jika sampai saat ini kemiskinan selalu menempel pada setiap rumah tangga masyarakat, maka yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas atau kemampuan dalam hal perencanaan sehingga pada outputnya dapat berguna dan kemiskinan hanya kenangan yang pernah tinggal pada setiap rumah tangga masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Apabila Pemerintah Desa kurang mampu membuat merancang program yang sesuai dengan permasalahan kemiskinan di Desa Kenual maka secara turun temurun akan menjadi faktor penghambat bagi keberhasilan suatu wilayah yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kenual.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang berdasarkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini menjelaskan bahwa studi kualitatif dibatasi sehingga tidak keluar dari jalur yang akan diteliti dan juga membatasi penelitian supaya dapat membatasi data yang penting dan yang tidak penting (Moelong,2010). Maka, Penelitian peneliti fokuskan pada :

1. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan.
2. Modal Sosial pemerintah desa dan masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan berfokus pada :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana modal sosial pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi :

1. Secara akademis, memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu pemerintahan dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ilmu Pemerintahan
2. Secara Teoritis, mengetahui hubungan keterkaitan Ilmu Pemerintahan dengan Pengetasan kemiskinan di Desa
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi kepada Pemerintah Desa Kenual dalam Pengentasan Kemiskinan di desa Kenual

F. Literature Review

Pertama, Artikel hasil penelitian oleh Titi Darmi, Iqbal Miftakhul Mujatahid (2019) “Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. Peneliti berfokus pada analisis kebijakan dana desa untuk upaya mengatasi kemiskinan. Peneliti mengambil judul penelitian ini bertujuan pada bagaimana kapasitas kebijakan dana desa dapat menjadi jalan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Sido Luhur, Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu: 1). Data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan keuangan desa, Musrembangdes, RPJMDes, APBDes dokumentasi dari hasil rapat yang dilakukan bersama stakeholders, laporan penggunaan uang desa dan regulasi yang mengatur terkait tentang kebijakan keuangan desa. 2) Data primer yakni dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan Fokus Group Discussion (FGD) kepada informan yang penulis anggap mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk melaksanakan kebijakan dana desa. Sumber yang diambil peneliti sebagai informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun

dan Tokoh Masyarakat yang dipercayai dapat memperkaya peneliti. Adapun hasil yang didapat peneliti dalam melakukan penelitian membuktikan bahwa kebijakan dana desa telah membuka ruang yang besar untuk berkontribusi yang efektif terhadap peningkatan Desa Sido Luhur. Namun peneliti menjelaskan bahwa kebijakan dana desa belum begitu berperan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan dalam perencanaan terhadap anggaran dana desa belum mendukung prioritas penanganan kemiskinan sebagaimana dengan tujuan terbitnya program pemerintah pusat seperti pemberian KIS, KIP, PKH dan Rastra sehingga kemiskinan di Desa Sido Luhur masih belum menurun seperti yang diharapkan. Persamaan yang penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya ambil sama-sama membahas tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan yang ada di daerah, sedangkan penelitian saya lebih spesifik membahas tentang pengentasan kemiskinan namun melihat dari kebijakan pemerintah desa dan modal sosial yang terjadi di masyarakat dalam menghadapi kurangnya kapasitas pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa.

Kedua, Artikel hasil penelitian oleh Irma Linda (2019) yang berjudul “Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran” Peneliti berfokus pada penguatan kapasitas Pemerintahan Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Peneliti mengambil judul penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Desa Sukajaya terhadap aparatur pemerintahan desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. Metode penelitian yang dipakai peneliti yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara dan dokumentasi. Sumber penelitian ini terdiri dari :

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kepegawaian, Kasi,Perwakilan BPD,Perwakilan LPMD,Perwakilan BUMDes dan Perwakilan PKK. Peneliti juga menjelaskan bahwasanya pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan pelatihan teknis yang dibuat untuk memberi pengharapan agar kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa baru sebatas bimbingan secara umum belum termasuk pada pelaksanaannya .Namun peneliti juga menjelaskan dalam pengembangan SDM karena kurangnya kesadaran para aktor desa dalam mengikuti bimbingan teknis yang akan dilaksanakan, peneliti juga menunjukkan kurangnya respon yang positif dari sebagian besar pemerintah desa dan anggota lembaga desa dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan, hal ini menyebabkan belum mampu meningkatkan kemampuan kinerja dari para aparatur desa dan anggota lembaga desa kurang aktif dalam mengikuti perencanaan program yang dilakukan pemerintah desa dan juga pengetahuan dan pemahaman yang minim terhadap tugas dan fungsi masing-masing sehingga tidak bisa melakukan pemerataan dalam pembagian beban kerja yang dilimpahkan pada pemerintah desa. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas kapasitas pemerintah, namun perbedaannya terletak pada fokus yang mana penelitian terdahulu membahas tentang penguatan sumber daya manusia dalam rangka membahas terkait dengan peraturan pelaksanaan kerja, sedangkan penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan serta modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Ketiga, Artikel hasil penelitian oleh Sitepu, Wiwit Amal Rini Br. (2022) "Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Islam." Berfokus pada analisis bantuan

yang diberikan kepada masyarakat berupa BLT dan PKH yang berdampak pada membantu kesejahteraan masyarakat yang terkena wabah Covid-19. Tujuan yang diambil peneliti adalah bagaimana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Penelitian ini juga dilatarbelakangi karena anjloknya perekonomian masyarakat pada saat terkena covid-19. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menegaskan bahwa dengan adanya BLT masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sebab pada masa pandemi covid-19 masyarakat kesulitan dalam mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, namun dengan negara yang berpenghasilan rendah bukti bansos ini tidak cukup dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah sama sama membahas tentang pengentasan kemiskinan, namun ini hanya pada tahap analisis bantuan yang diberikan pada pemerintah pusat dalam bentuk BLT dan PKH. Sedangkan, perbedaan yang peneliti ambil adalah tentang kapasitas pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Desa Kenual yang berdasar pada kebijakan dana desa dan modal sosial yang dimiliki masyarakat sehingga tidak bergantung pada program saja atau memburu program yang diberikan pemerintah pusat sehingga terkesan manja dan tidak mau bekerja.

Keempat, Artikel hasil penelitian Oleh Toto Kushartono (2022) yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa” Berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola aset desa yang mereka punya untuk mengukur keberhasilan dengan pelatihan dan pendidikan

terhadap tata kelola Desa. Tujuan penelitian ini juga terletak pada bagaimana kapasitas pemerintah desa melalui tata kelola aset desa. Penelitian ini berdasar pada beban APBDes yang diperoleh desa atas hak untuk pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan dan peningkatan aset desa maka diyakini mampu untuk mengatasi kemiskinan, namun penelitian ini juga melihat pengelolaan terhadap aset desa belum maksimal dan tingkat kepedulian masyarakat dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini juga membahas pendidikan dan pelatihan tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa melalui Tata Kelola Aset Desa bagi para Pemerintah Desa. dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia. Perbedaan ini dengan penelitian yang saya ambil adalah penelitian ini berfokus pada pemberian pelatihan dan pengajaran untuk peningkatan SDM bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Tata Kelola Desa untuk pelayanan masyarakat, Sedangkan persamaannya pada output sama sama ingin mengatasi kemiskinan yang ada di Desa.

Kelima, Artikel hasil penelitian Oleh Lukman Munawan Fauzi (2016), yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Penelitian ini mempunyai fokus dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Penelitian ini bertujuan bagaimana Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu kualitatif. Penelitian ini juga dilatarbelakangi tentang bagaimana persiapan Pemerintah Daerah dalam proses masyarakat dalam menghadapi situasi ekonomi sekarang, melihat ini Pemerintah Daerah tidak hanya berfokus pada

pembangunan saja namun terletak pada pembangunan kapasitas yang dimiliki dalam menjalani pemerintah daerah dalam rangka perbaikan ekonomi serta mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Buton. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil yaitu sama-sama membahas tentang peningkatan kapasitas atau kemampuan pemerintah dalam membangun ekonomi untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas pada peningkatan kapasitas pemerintah untuk mempersiapkan untuk menghadapi MEA, Akan tetapi, penelitian saya meneliti mempertanyakan kapasitas pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan melalui landasan teori tentang kebijakan dan modal sosial masyarakat dalam bergotong royong untuk mengatasi kemiskinan menjerat masyarakat sehingga tidak berkembang.

Keenam, Artikel hasil penelitian Oleh H R Riyadi Soeprapto yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance”. Penelitian ini berfokus pada pengembangana kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan menuju Good Governance. Tujuan penelitian ini terletak pada bagaimana Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam menuju keadaan Good Governance. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang Good Governance, otonomi daerah dan pentingnya Capacity Building dalam meningkatkan kemandirian rakyat seperti nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi kehendak masyarakat demi pencapaian tujuan nasional. Pencapaian tujuan nasional dengan mempertegas acuan kinerja Pemerintah Daerah, Peningkatan manajemen publik Pemda, meningkatnya kemampuan organisasi Pemda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

saya ambil yaitu sama-sama membahas kapasitas Pemerintah dalam mewujudkan kemajuan pada daerah. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian di daerah berfokus pada daerah sedangkan penelitian ini pada lingkup desa dan meneliti tentang kebijakan pemerintah desa untuk mengatasi kemiskinan serta modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam bergandengan tangan mengatasi kemiskinan.

Ketujuh, Artikel hasil penelitian Oleh Andi Ariadi (2019) yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Desa” Fokus pada penelitian ini yaitu terhadap perencanaan pembangunan desa dalam rangka mengalokasikan kebijakan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini juga dilatar belakangi dengan alokasi dana desa yang kurang tepat sasaran yang dikaji melalui perencanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melibatkan masyarakat untuk menjadi partisipatif guna dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuannya pembangunan desa. dengan secara detail dalam hal perencanaan guna untuk menentukan arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang pembangunan dana desa untuk rencana kerja yang mencapai tujuan pembangunan desa yang maju. Sedangkan, perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah penelitian saya membahas tentang bagaimana pemerintah desa mempunyai kapasitas dalam rangka mengatasi kemiskinan yang

saat ini menjadi masalah bersama semua wilayah yang terbelenggu di kehidupan masyarakat Desa Kenual.

Kedelapan, Artikel hasil penelitian Oleh Gugun Geusan Akbar DKK (2019) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut” Fokus penelitian ini Perencanaan Pembangunan Desa di Desa. Tujuan Penelitian ini terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Penelitian ini juga dilatarbelakangi dengan adanya otonomi yang diberikan untuk melakukan pembangunan demi kemajuan desa dengan otoritas yang dimiliki sehingga masyarakat bisa sejahtera, karena kesejahteraan dapat dilihat prosesnya karena adanya pembangunan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang alat bangsa yang digunakan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan demi kesejahteraan rakyat adalah pembangunan. Dengan melakukan inti pelaksanaan otonomi yang diberikan dengan memerankan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Pembangunan Desa dapat berjalan optimal apabila melakukan prinsip-prinsip Good Government seperti partisipasi,transparansi,dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil sangat jelas bahwasanya penelitian ini hanya menganalisis perencanaan pembangunan yang ada di desa, Sedangkan penelitian saya adalah lebih ke bagaimana caranya pemerintah desa memiliki kemampuan dalam mengatasi kemiskinan yang merajalela di masyarakat, namun persamaannya sama sama membahas tentang perencanaan dengan memikirkan rakyat sejahtera tentunya dengan rakyat sejahtera maka kemiskinan akan hilang dari bangsa ini Terutama di Desa Sukamaju dan Desa Kenual tempat lokasi penelitian.

Kesembilan, Artikel hasil penelitian Oleh Sangat Y Londa (2020) yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pengusaha di Zona Penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini mempunyai fokus penelitian pada pengembangan kapasitas masyarakat pengusaha di zona penyangga Taman Nasional Laut Bunaken. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas masyarakat pengusaha di zona penyangga Taman Nasional Bunaken Provinsi Sulawesi Utara. Hasil Penelitian ini menjelaskan masyarakat Metode yang peneliti gunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini membahas potensi dan posisi Taman Nasional Laut Bunaken untuk menunjang kelangsungan hidupnya melalui kegiatan usaha. Dengan prioritas itu maka untuk menemukan modelnya dilakukan pengembangan kemampuan masyarakat pelaku usaha di wilayah Taman. Pengembangan yang dilakukan adalah memperhatikan aspek sumber daya manusia, kelembagaan, pengembangan kapasitas dengan pelatihan pengetahuan serta keterampilan serta dilakukan pendampingan untuk memberikan pencerahan dalam mengendalikan usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini membahas pembangunan kapasitas masyarakat untuk menjadi pelaku usaha. Sedangkan, penelitian saya meneliti tentang kapasitas pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan. Persamaannya adalah dengan melakukan usaha maka kesejahteraan akan hilang dan dapat mengatasi kemiskinan.

Kesepuluh, Artikel hasil penelitian Oleh Arry (2019) yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance” Fokus penelitian ini merupakan peningkatan kapasitas pada aparatur desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu

bagaimana peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance, Metode yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan tentang cara dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa untuk menjadi pemerintahan yang maju dan untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat menghambat dan pendukung dalam meningkatkan kapasitas Desa Ukui Dua menuju pemerintahan yang baik dan maju. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini mengkaji kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan Good Governance. Sedangkan, penelitian saya fokus pada mengatasi kemiskinan. Persamaannya adalah sama membahas tentang peningkatan kapasitas namun outputnya juga sama tentang pengentasan kemiskinan.

Literature review (tinjauan pustaka) diatas sebagai acuan langkah kritis dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai pengentasan kemiskinan di desa Kenual, Dengan membandingkan temuan dari penelitian sebelumnya, *literature review* membantu dalam mengkonfirmasi atau menguji ulang hasil penelitian yang baru.

G. Kerangka Konseptual

1. Kapasitas Pemerintah Desa

a) Konsep pemerintah desa

Kapasitas dalam ilmu pemerintahan merujuk pada kemampuan atau daya pemerintah untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan publik serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Woolcock mendefinisikan kapasitas pemerintah sebagai "kemampuan lembaga-lembaga

untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses-proses pemerintahan dan mengawasi pemerintah." (*The World Bank Research Observer*, vol.15, No. 2 August 2000).

Organisasi yang memiliki kapasitas kepemimpinan disinyalir akan berdampak pada kinerja organisasi. Kapasitas kepemimpinan dapat melakukan proses pengembangan kapasitas individu, organisasi dan sistem yang dimiliki organisasi (Darmin, T. et.al., 2017; Taun, 2007; Stephen Ocheni, Moses Atakpa, 2012). Para pakar menjelaskan pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sehingga kemampuan yang dimiliki SDM dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dapat menjalankan roda organisasi, dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dalam konteks kapasitas kebijakan dana desa dimaknai bagaimana para pelaku atau pengelola kebijakan dana desa dapat pengembangan, inovasi dalam mengelola dana desa *journal of Indonesia public administration and governance studies (JIPAGS)*.

Kapasitas pemerintah desa merujuk pada kemampuan atau daya yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dengan efektif dan efisien. Kapasitas ini penting karena menentukan sejauh mana pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, serta memberikan layanan publik yang memadai. Kapasitas

pemerintah desa dalam membuat kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di tingkat lokal.

Kapasitas pemerintah desa termasuk kemampuan untuk merencanakan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang terarah dan berkelanjutan. Ini melibatkan penentuan prioritas-prioritas pembangunan berdasarkan analisis kebutuhan serta pengalokasian sumber daya yang efisien. Pemerintah desa harus mampu mengimplementasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini meliputi koordinasi antar berbagai lembaga, pengelolaan anggaran dengan baik, dan pelaksanaan kegiatan lapangan secara efektif.

Kapasitas dalam mengelola sumber daya lokal, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun infrastruktur, merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pembangunan. Pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk menilai dampak kebijakan, mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan, serta membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk menilai dampak kebijakan, mengidentifikasi keberhasilan dan

kelemahan, serta membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

b) Pengertian pemerintah desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah institusi yang berbadan hukum dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dan pemerintah adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankannya secara bersama sama oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat-perangkatnya. Kepala Desa wajib melakukan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa adalah salah satu bagian dari Pemerintahan Nasional yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayah pedesaan. Pemerintahan Desa adalah proses yang dimana usaha usaha di masyarakat desa yang bisa dipadukan dengan usaha usaha pemerintah demi mencapai kesejahteraan hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Nasution menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak yang strategis untuk keberhasilan dalam mensukseskan program. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai unit terdepan yang dapat melayani masyarakat sebagai sub pokok dan wewenang tugas pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan pemerintahan desa sangat menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan didukung oleh rakyat. Ini juga menjadi bukti bahwa pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis. Pemerintah yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Udak 2003:92). Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) diterbitkan dalam rangka melanjutkan undang-undang desa. Adapun susunan tata kerja pemerintahan desa yang terkandung didalamnya terdiri dari :

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangga Pemerintahan Desa. Kepala Desa diberikan wewenang, tugas dan kewajiban dalam bertugas untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa dalam tugasnya dapat melakukan pembangunan sarana prasarana dalam 3 bidang yaitu perdesaan, pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga wajib untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah pimpinan sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris desa dibantu oleh staf sekretaris yang merupakan bagian dari Sekretariat Desa. Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, Urusan Tata Usaha dan Umum dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Umum dan Perencanaan serta Urusan Keuangan yang masing masing dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3) Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

4) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Dalam penentuan jumlahnya dilakukan secara proporsional atau sama rata dengan pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan desa yang dilihat dari luas wilayah kerja karakteristik, jumlah

kepadatan penduduk, geografis, serta sarana prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas. Kepala Dusun atau sebutan lain adalah Pelaksana kewilayahan. Tugas Kepala Dusun yaitu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, mengawasi pelaksanaan pembangunan, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kenyamanan dan kepentingan desa.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa yang memegang kebijakan terhadap penyelenggaraannya Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pelaksana Teknis, berbicara pemerintah maka harus siap untuk melihat segala permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama dalam penentuan kebijakan yang harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Berbicara kebijakan juga adalah bagian dari kapasitas pemerintah desa bagaimana caranya untuk mengatur regulasi, mengoptimalkan aset-aset desa sampai pada membuka jaringan untuk memecahkan atau membongkar desa agar lebih maju sehingga tidak masyarakat yang kesulitan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

2. Kebijakan Pemerintah Desa

Teori kebijakan dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kennet Prewitt yang menegaskan bahwa “Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi” Sedangkan Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai langkah ketetapan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah Pertama, Kebijakan selalu mempunyai visi tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan berisi tindakan-tindakan pemerintah. Ketiga, Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh individu, kelompok, badan atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. Keempat, kebijakan yang diambil bersifat positif dalam arti merupakan tindakan mengenai segala sesuatu tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan tindakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan adalah kebijakan pemerintah desa suatu keputusan yang diambil untuk menyikapi permasalahan tertentu yang dibangun oleh pejabat pemerintah desa dalam melihat segala permasalahan yang ada di Desa. Contohnya dalam hal kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat kesulitan dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari, hal ini juga bisa dilihat dari berbagai faktor sesuai kondisi empiris yang ada di desa. Faktor yang biasa menyebabkan kemiskinan adalah faktor pendidikan yang rendah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, rendahnya perhatian pemerintah dalam menyikapi hal tersebut. Selama ini kebijakan pemerintah desa hanya mengandalkan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Kemensos seperti BLT dan PKH namun belum ada kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jika dikatakan kurangnya dana dalam membangun atau mengentaskan kemiskinan. Sebagai Pemerintah Desa harus membukakan jalan dan tidak menolak berinovasi untuk mengoptimalkan aset-aset desa atau kapasitas ekstraksi untuk peningkatan PADes dalam rangka mengentasi kemiskinan yang merajalela di masyarakat. Itulah mengapa pentingnya kebijakan pemerintah Desa dalam pengentasan kemiskinan.

3. Modal Sosial

Berbicara modal sosial dapat diidentifikasi dengan “sifat-sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi” (Putnam, 1993) Namun walaupun banyak yang masuk dalam kategori penulis menitik beratkan pada kepercayaan (trust). Tidak Jauh berbeda dari, Francis Fukuyama (1995) menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan, demokrasi dan daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Berdasarkan pendapat kedua peneliti poin penting yang tidak bisa dipisahkan dari modal sosial adalah kepercayaan, karena kesejahteraan, kondisi yang terjadi di masyarakat karena kepercayaan yang saling bergandengan tangan untuk saling

berkoordinasi demi satu kebijakan atau tujuan yang sama. Beberapa Elemen penting dalam modal sosial yaitu :

a) Kepercayaan (*Trust*)

Menurut Putnam (1993), kepercayaan sosial dalam dunia modern muncul dari dua sumber yaitu norma resiprositas dan jaringan partisipasi warga. Yang artinya, bahwa kepercayaan adalah sejenis pelumas yang membuat partisipasi dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah akan meningkat karena kepercayaan. Anda mempercayai Kepala Desa bakal amanah dalam mengentaskan kemiskinan karena melihat janjinya, lalu Anda memilihnya karena rasa kepercayaan yang Kepala Desa bangun dengan watak, tingkah laku baik dan uluran tangannya dalam membantu masyarakat sehingga menjadi aset berupa reputasi yang selama ini dia investasikan.

b) Upaya-Upaya Kooperatif Antar Anggota Organisasi

Organisasi adalah suatu perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan yang sama, secara struktur organisasi dipimpin oleh ketua sampai pada anggota organisasi di level terbawah, hal ini juga perlu adanya kesepakatan tentang tujuan dan sasaran yang ingin mereka capai bersama dalam berorganisasi. Dalam mencapai kesepakatan maka ada empat situasi yang dibuat bersama. Pertama, kepedulian sesama. Kedua, saling menghargai satu sama lain. Ketiga, organisasi harus disepakati aturan supaya jika ada yang menyimpang dari tujuan maka harus dikenakan sanksi sesuai kesepakatan. Keempat, harus ada pihak luar yang menegakkan kesepakatan itu.

Apabila poin-poin diatas dapat dilakukan secara baik dan rutin, sesuai dengan jobdesk organisasi maka akan tercipta suatu organisasi yang kondusif dalam menjalankan visi organisasi, yang berdampak pada organisasi itu sendiri.

c) *Mutual Affection*

Banyaknya kegiatan yang berlangsung akibat orang-orang yang ada di dalam karena saling peduli satu dan lainnya, Dengan demikian maka akan membentuk rasa percaya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mereka. Begitu juga terhadap pemerintah apabila pemerintah menjalankan tugas dan fungsi dengan saling percaya terhadap aparatur pemerintah maka akan terciptanya modal sosial karena eratnya rasa kepercayaan. Sebaliknya, apabila masyarakat diberdayakan dengan baik maka terciptanya kepercayaan yang dapat mengindahkan segala kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat.

d) *Penciptaan Jaringan Sosial*

Jaringan ini dibangun untuk membangun rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi. Ibaratnya kita dilahirkan dengan kondisi berbeda dan aliran yang berbeda. Namun, harus bisa bersatu dengan yang lain agar dapat membentuk jaringan yang erat antara satu sama lain. Membangun jaringan ini harus berkontribusi langsung pada kesejahteraan seseorang dengan menganggap sebagai seorang sahabat.

Berdasarkan uraian diatas, Mengapa modal sosial sangat penting diketahui bahwasanya dari sisi perspektif masyarakat harus dilihat, apabila pemerintah baik dalam menjalankan pemerintahan maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat tinggi dan pasti diikuti karena kebijakan bersifatnya mengikat yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Namun, walaupun mengikat apakah

kebijakan itu positif atau negatif untuk diterima masyarakat. Pada hal nya penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian yang turun atau dikatakan miskin harus didistribusikan dengan baik tapi banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat karena ulah pemerintah yang tidak mempunyai kepercayaan yang diberikan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahnya. Dengan investasi yang buruk maka akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lain sebab sudah terbentuknya modal sosial.

4. Pengentasan Kemiskinan

a) Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan masyarakat dalam mencukupi kehidupannya secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan standar hidup di suatu wilayah tempat tinggalnya. Keadaan ini juga mempunyai faktor yang merujuk pada rendahnya kemampuan pendapatan yang didapat dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan dalam menghasilkan pendapatan yang rendah ini juga berimbas pada standar kesehatan dan standar pendidikan yang layak bagi masyarakat. Keadaan masyarakat yang terjerat kemiskinan dapat diketahui berdasarkan pendapatannya memenuhi standar hidup atau tidak (Nugroho, 1995). Pada dasarnya , standar hidup manusia yang disebut masyarakat bukan hanya berbicara tentang kebutuhan pangan yang sudah terpenuhi, namun juga memperhatikan dari kesehatan dan pendidikannya. Tempat tinggal yang layak adalah salah satu manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan masuk dalam kategori dapat mensejahterakan dirinya. Berdasarkan keadaan ini, masyarakat dapat disebut miskin karena memiliki pendapatan yang rendah sehingga

masyarakat tidak dapat mensejahterakan dirinya sendiri (Suryawati, 2004). Kemiskinan menjadi tantangan bersama bagi negara-negara yang berkembang akibatnya kemiskinan masih saling berkaitan dengan namanya pembangunan, persoalan kemiskinan juga bukan hanya dengan pendapatan yang rendah tapi juga konkrit pada bentuk ketidakberdayaan secara politik dan sosial (Suryawati, 2004). Secara universal, Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya yang dapat menjamin standar kualitas hidup masing-masing masyarakat.

Jika dilihat dari banyak pendapat diatas maka kemiskinan dapat diukur dalam berbagai cara :

1) Kurangnya pendapatan masyarakat

Hal ini berbeda tolak ukur dari negara satu ke negara lainnya, bahwasanya harus menyesuaikan kondisi ekonomi negara masing-masing serta kebijakan yang diambil pemerintah yang bersifat publik dalam menanganinya. Dengan kurangnya pendapatan maka masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang,pangan dan papan.

2) Kekurangan pengakuan kebutuhan sosial

Individu selalu dianggap rendah bahkan bisa jadi dikucilkan, ketertinggalan sumber daya manusia dari manusia lainnya, sehingga dapat menurunkan partisipasi dengan individu lainnya.

3) Kekurangan Materi

Materi adalah kunci bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,apabila individu tidak mampu untuk membuatnya berhasil menghasilkan

materi maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupan sehari hari, mendapatkan tempat tinggal layak, kesehatan yang tidak layak sehingga menyebabkan kematian dan pendidikan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

b) Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Khosman (2015) DKK dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi orang miskin, dapat dikategorikan menjadi :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan keadaan individu yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau pendapatan yang dihasilkan dibawah pendapatan rata-rata yang dibuat oleh negara tempat masyarakat itu bertinggal.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dipengaruhi oleh ketidakmerataannya pembangunan sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Meskipun, sudah diatas rata –rata pendapatan penduduk miskin namun masih dibawah pendapatan individu lain yang ada di daerahnya. Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dikatakan kemiskinan relatif karena dipengaruhi oleh lingkungannya.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang sudah turun menurun akibat tingkah laku yang sudah menjadi budaya, baik dalam pemikiran maupun cara manusia bekerja. Kemiskinan kultural dapat diambil contoh di masyarakat yaitu mudah menyerah pada nasib yang dideritanya, malas dalam bekerja, menolak pada

kemajuan teknologi, konsumtif, dan hanya menggantungkan bantuan yang berasal dari pemerintah.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana manusia tidak dapat memakai sumber daya yang tersedia untuk mereka sendiri.

Dalam penelitian ini, kemiskinan yang diteliti di Desa Kenual merupakan kemiskinan relatif, hal ini dikarenakan standar kemiskinan diukur berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat dibandingkan dengan standar hidup rata-rata di daerah tersebut. Walaupun ditemukan beberapa keluarga memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun tetap dianggap miskin karena pendapatan dan akses mereka terhadap layanan dasar jauh di bawah rata-rata komunitas yang di atas mereka. Alasan utama terjadinya kemiskinan relatif ini termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja yang terbatas, serta infrastruktur yang kurang memadai. Penemuan lain di lapangan dilihat dari banyaknya keluarga yang bergantung pada pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak menetap. Perlu dipertegas bahwa kemiskinan di Desa Kenual tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan keturunan, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitas umum yang memadai, yang semuanya berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

c) Penyebab Terjadinya Kemiskinan

1) Kurang Tersedia Lapangan Kerja

Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang layak, tetap dan berkelanjutan tentunya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ini dalam jumlah besar dalam negara maka sangat memerlukan perhatian yang khusus bagi pemerintah agar bisa mencari solusi agar mereka bisa lepas dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun kapasitas jaringan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang tidak mendapat pekerjaan yang layak.

2) Pendidikan Yang Kurang

Kemajuan atau kemiskinan seseorang sebagian besar ditentukan dengan pendidikan yang ia tempuh sebab dapat menunjang diri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kurangnya pendidikan menghambat perkembangan individu dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan pendidikan maka akan membuka diri untuk menumbuhkan jiwa berusaha bahkan mencukupi aspek kebutuhan dalam penerimaan pekerjaan, cara berpikir yang logis dan manajemen dalam mencukupi kehidupannya sendiri. Pendidikan juga harus dirasakan oleh setiap anak yang berada di Indonesia sebab Indonesia memiliki tujuan mencerdaskan setiap kehidupan anak bangsa.

3) Perubahan Iklim atau Bencana Alam

Perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi kemiskinan seseorang sebab dapat menghancurkan atau menghilangkan barang yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya banjir, tanah longsor dll

4) Minimnya Infrastruktur

Jalan yang buruk, kurangnya fasilitas penghubung seperti jembatan, koneksi internet yang buruk menyebabkan keterbatasan informasi yang akan diterima dan minimnya akses transportasi umum menyebabkan masyarakat susah untuk melakukan aktivitas untuk menuju kota lainnya.

5) Minimnya Dukungan Pemerintah

Tidak mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah mengakibatkan penghasilan masyarakat masuk dalam tahap yang rendah. Dukungan yang dimaksud berupa bantuan dana hibah, pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

6) Kualitas Kesehatan Yang Kurang Baik

Kurangnya layanan kesehatan yang memadai mengakibatkan masyarakat yang sakit tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sudah seharusnya melayani kesehatan menjadi prioritas utama bagi masyarakat karena termasuk dalam kebutuhan primer.

7) Tingginya Harga Kebutuhan

Kecilnya penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi untuk memenuhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apabila hal ini terjadi dalam jangka waktu panjang maka berakibat juga pada kemiskinan panjang yang terjadi.

d) Dampak Akibat Kemiskinan

Negara-Negara yang banyak penduduknya terjerat kemiskinan maka akan ada dampak yang dirasakan serta akan membahayakan bahkan merugikan negara, dampak-dampak yang diakibatkan karena kemiskinan yaitu :

1) Angka Kriminalitas Yang Tinggi

- 2) Akses Pendidikan tertutup
 - 3) Angka Pengangguran yang Tinggi
 - 4) Pelayanan Kesehatan yang Memburuk
 - 5) Angka kematian tinggi
 - 6) Kerusuhan atau penjarahan
 - 7) Beresiko pada Kegagalan Negara dalam Menjalankan Fungsi Dasarnya, misalnya Penegakan Hukum dan Menyediakan Layanan Publik yang Memadai.
- e) Upaya Menghindari Kemiskinan

Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebab yang mengemban tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan negara serta harus memberdayakan masyarakatnya agar sejahtera. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk berupaya dalam pengentasan kemiskinan, yaitu :

- 1) Subsidi dari Pemerintah
- 2) Kapasitas jaringan pemerintah dan pengusaha dalam membuka lapangan pekerjaan
- 3) Pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia
- 4) Pelayanan Kesehatan yang mudah
- 5) Menstabilkan harga kebutuhan primer
- 6) Memudahkan akses informasi
- 7) Pembangunan yang Merata.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Moelong menjelaskan bahwa karakteristik penelitian kualitatif deskriptif merupakan

kumpulan data yang berberbentuk kata-kata atau narasi dan gambar tentang kondisi empirik (Moleong,2018). Berbeda dengan Nazir yang mengatakan tujuan dari penelitian deskriptif adalah dengan cara mendeskripsikan secara akurat tentang,kebenaran,sifat dan hubungan sesama yang diteliti (Nazir, 2005:54).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diartikan mengumpulkan data dengan menggali lebih dalam fenomena atau permasalahan yang ada melalui wawancara,observasi dan pemanfaatan dokumen tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Desa Kenual,Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

2. Lokasi, Objek dan Subjek Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan yang berlokasi di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

b) Objek Penelitian

Objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Desa dalam pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam menentukan kebijakan pemerintah desa menjadi tepat sasaran di Desa Kenual,Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

c) Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari Pemerintah Desa Kenual dan masyarakat yang ikut andil mengurus di bidang pengentasan kemiskinan beserta dengan para tokoh masyarakat setempat. Tokoh –tokoh yang dipilih sebagai informan adalah tokoh-tokoh khusus karena berhubungan dengan objek penelitian dan bisa diandalkan

untuk memberikan informasi dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive, artinya metode penentuan informan dipilih sebelum melakukan penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun tokoh-tokoh yang akan menjadi informan bagi penelitian ini yang sudah dipilih secara khusus yaitu ;

- a. Kepala Desa Kenual
- b. Sekretaris Desa
- c. Ketua BPD Kenual (Badan Permusyawaratan Desa)
- d. Kaur Keuangan
- e. Kaur Pembangunan
- f. Kepala Dusun
- g. Tokoh Masyarakat
- d) Deskripsi Informan

Hasil analisis data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi dan juga menggunakan acuan jurnal atau diklat yang berhubungan dengan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 10 orang informan, yang terdiri dari 5 tokoh masyarakat termasuk penerima bantuan, dan 5 orang pemerintah desa. Penelitian ini berfokus pada kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif partisipan, dengan menekankan pada makna yang diberikan oleh individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih berfokus pada

pengumpulan dan analisis data berupa angka, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang lebih deskriptif dan interpretatif.

Metode-metode dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi partisipan, analisis konten, dan analisis naratif, di antara lain. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, pendidikan, psikologi, antropologi, dan bidang-bidang lainnya di mana peneliti tertarik untuk memahami nuansa kompleks dari pengalaman manusia dan interaksi sosial. Penelitian kualitatif di desa bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan pedesaan. Beberapa topik yang dapat dieksplorasi melalui penelitian kualitatif di desa termasuk:

- a. Struktur Sosial: Mengidentifikasi hierarki sosial, peran gender, sistem kekerabatan, dan dinamika interaksi sosial di antara penduduk desa.
- b. Kehidupan Ekonomi: Meneliti sumber daya ekonomi yang dominan (seperti pertanian, peternakan, atau kerajinan), strategi bertahan hidup, masalah keuangan, dan cara-cara di mana orang di desa memanfaatkan sumber daya lokal.
- c. Budaya dan Tradisi: Mendokumentasikan tradisi lokal, ritual, kepercayaan, dan praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.
- d. Pola Pemukiman dan Infrastruktur: Meninjau pola pemukiman, infrastruktur dasar (seperti akses air, sanitasi, dan listrik), serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa terkait dengan infrastruktur.
- e. Pendidikan dan Kesehatan: Memahami akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan layanan tersebut.

- f. Perubahan Sosial: Melacak perubahan sosial, termasuk urbanisasi, migrasi, modernisasi, dan dampaknya terhadap kehidupan di desa.
- g. Partisipasi Masyarakat: Meneliti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal, organisasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Konservasi Lingkungan: Meninjau praktik-praktik lingkungan, pemahaman masyarakat tentang lingkungan, serta upaya konservasi alam dan keberlanjutannya di desa.

Penelitian kualitatif di desa sering melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam dengan penduduk desa, dan analisis konten dari data yang terkumpul, memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang dalam dan kontekstual tentang kehidupan di pedesaan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan oleh peneliti. Dengan cara melalui wawancara mendalam dengan setiap informan dan melakukan observasi serta dokumentasi.

Penelitian dilakukan pada bulan maret untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan oleh peneliti. Dengan cara melalui wawancara mendalam dengan setiap informan dan melakukan observasi serta dokumentasi. Penelitian diawali dengan menyerahkan surat tugas penelitian pada Tanggal 29 maret 2024. Kepada pihak Desa Kenual kecamatan Nanga Pinoh jika peneliti ingin melakukan penelitian di desa kenual, dengan fokus penelitian pada Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Dimana pada saat menyerahkan surat permohonan izin penelitian tersebut di Desa Kenual peneliti langsung bertemu dengan Kepala Desa Kenual dan beberapa perangkat desa yang seda berada di kantor Desa. Peneliti juga

di terima dengan baik di kantor desa dan diizinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di desa kenual, pemerintah desa juga memfasilitasi penelitian sebagai narasumber dan memberikan data data akurat mengenai Desa.

Peneliti mendapat akses penelitian untuk langsung bertemu dengan Kepala Desa Bersama perangkat Desa, Masyarakat, serta masyarakat yang mendapat Bantuan Langsung Tunai. Pada tanggal 2 april 2024 peneliti melakukan wawancara langsung bersama Kepala desa, dan beberapa perangkat Desa yang berkaitan langsung dengan foKus penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Pada tanggal 5 sampai 8 april peneliti melakukan wawancara langsung Bersama Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat yang menerima Bantuan langsung Tunai maupun BLT.

Peneliti tidak menemukan kesulitan dalam proses wawancara yang berlangsung secara tatap muka, masyarakat dan pemerintah desa juga bersedia untuk di wawancara, namun peneliti merasa ada yang janggal, dimana jawaban pemerintah desa dan masyarakat tidak selaras. Dari hasil wawancara tersebut peneliti memberi kesimpulan bahwa ada masalah yang terjadi di desa kenual sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data maka metode penelitian kualitatif memiliki beberapa cara Metode-metode tersebut adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi (Pengamatan)

Suatu pendekatan untuk mengumpulkan data, observasi dapat diartikan dengan mengamati keadaan lingkungan dan mencatat komponen-komponen yang

terlihat pada objek penelitian. Yang terlihat pada objek penelitian dan dicatat sebagai komponen yang diperlukan itu disebut sebagai informasi atau data, data atau informasi itu harus dicatat secara akurat dan lengkap (Moeleong, 2018). Menurut peneliti yang dapat disimpulkan dari pernyataan di atas, pengamatan adalah langkah yang paling awal untuk melanjutkan melakukan penelitian. Contoh dengan memperhatikan keadaan sekitar tempat objek penelitian maka akan memperoleh data atau informasi sebagai acuan melakukan penelitian.

Pada penelitian ini yang akan diobservasi oleh peneliti yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Dari tulisan diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan observasi ditemukan oleh peneliti di Desa Kenual, Secara struktur, ada orang yang memiliki hak serta wewenang tertentu dalam Pengentasan Kemiskinan, yang berdampak pada bagaimana kemampuan atau kapasitas dalam mengatasi kemiskinan sehingga Pemerintah Desa dapat benar-benar dibuktikan mampu untuk mengelola atau merencanakan program yang baik untuk Desa dalam pengentasan kemiskinan. Apakah sudah sesuai dengan konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

2) Wawancara (*Interview*)

Pada penjelasan ini juga menjelaskan pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian yaitu dengan melakukan wawancara. Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara. Dalam kegiatan ini minimal harus ada dua orang yang melakukan percakapan yaitu pewawancara yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan, dan lawan bicara yang menanggapi pertanyaan-pertanyaannya. (Moleong, 2018: 186).

Peneliti melakukan teknik wawancara dengan bertujuan menggali informasi dari responden mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Kenual. Teknik ini juga dilakukan untuk menggali apa yang informan ketahui serta pertanyaan yang diajukan dapat bersifat masa lalu dan masa depan terhadap masalah yang diambil. Peneliti juga menggali sedalam-dalamnya fakta yang dapat dijadikan bukti data terkait masalah yang diteliti selama wawancara.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) mengatakan peristiwa yang sudah berlalu disebut dokumen, studi dokumen yaitu sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi juga menjadi bukti dari pengumpulan data yang mana nanti akan diperiksa untuk memperoleh data atau informasi yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti atau masalah yang dicari datanya. Dokumentasi biasa diambil oleh peneliti sebagai catatan peristiwa yang sudah terjadi serta diabadikan dengan berbentuk gambar bersama informan, gambar-gambar struktur desa, aset desa, gambar lingkungan desa, serta gambar-gambar yang akan dijadikan penguatan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu juga ditambahkan rekaman para informan agar menambah valid informasi data atau informasi yang di dapat

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka dan tujuan penelitian maka harus melakukan tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:134-142), sebagai berikut :

1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam memperoleh data menggunakan penelitian kualitatif yaitu dapat melakukan observasi, melakukan wawancara dengan informan secara mendalam, mengumpulkan dokumentasi, atau menggunakan triangulasi dari metode-metode tersebut. Untuk memperoleh data yang lebih akurat. Dalam pengumpulan data ini membutuhkan waktu sehari-hari, minggu atau bulanan sampai data siap diolah.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan lebih banyak pengumpulan data, reduksi data untuk memberi fokus kepada peneliti untuk memilih hal-hal yang penting, aspek-aspek penting sehingga peneliti mendapatkan tema dan pola. Namun yang tidak penting maka harus dibuang agar memberi gambaran yang jelas bagi peneliti. Setelah itu peneliti dapat menggunakan teori untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. temuan pada penelitian kualitatif menjadi penekanan utama. Proses reduksi data sangat sulit membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi serta keluasan, kedalaman, dan wawasan (Sugiyono, 2017:137).

3) *Data Display* (Penyajian)

Dari pernyataan di atas maka langkah selanjutnya adalah menunjukkan data setelah data yang diterima telah disederhanakan atau ringkas, Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa ringkasan singkat, infografis, hubungan antar

kategori, dan diagram. Peneliti berusaha dalam menyusun data yang didapat secara relevan untuk dapat menghasilkan informasi atau data yang dapat diringkas dan memiliki arti tertentu sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:137) mengungkapkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif.

4) *Verification* atau *Conclusion Drawing*

Proses terakhir merupakan kesimpulan yang diambil atau melakukan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan kebaruan dari hal yang belum pernah ada (Sugiyono, 2017:142). Hal yang ditemukan menyerupai deskripsi atau penjelasan suatu objek yang sebelumnya belum jelas atau tidak nyata sehingga menjadi jelas dan nyata dengan pemeriksaan lebih dekat. Tujuan penelitian pada proses terakhir ini adalah dengan membuat keputusan berdasarkan data atau informasi yang masih tentatif dan dapat berubah apabila tidak ada bukti yang kuat. Hasilnya nanti di tunjukan sebagai titik poros dalam menjawab data dan masalah mengenai Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

BAB II

DESKRIPSI DESA KENUAL

A. Sejarah Desa Kenual

Sejarah dari Desa Kenual merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Niaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada tanggal 09 Oktober tahun 2007, pemekaran dilakukan bahwasanya wilayah desa tanjung niaga yang terlalu luas sehingga sangat menghambat dalam distribusi pembangunan yang membuat suatu wilayah tertinggal. Desa Tanjung Niaga dan Desa Kenual sama sama menduduki wilayah ibukota Kecamatan Nanga Pinoh namun Desa Kenual adalah wilayah yang agak pinggir dari ibukota Kecamatan Nanga Pinoh, dulunya Desa Kenual hanya wilayah Dusun namun seiringnya perkembangan zaman dan banyaknya peningkatan populasi masyarakat sehingga Dusun Kenual menjadi Desa Kenual.

Desa Kenual terbagi menjadi lima Dusun (5) dan 13 RT. Adapun lima dusun itu ialah:

Tabel 2. 1 Nama Dusun dan Jumlah RT

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT
1.	Gelora Juang	3 (001,002,003)
2.	Sibau Permai	3 (004,005,006)
3.	Lingkar Bandara	2 (007,008)
4.	Kerangan Sibau	2 (009,010)
5.	Nusa Indah	3 (011,012,014)

Sumber: (Buku Profil Desa) 6 Januari 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 ini menunjukkan bahwasanya Desa Kenual terbagi wilayah menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Gelora Juang yang berada pada wilayah dataran tinggi atau perbukitan yang jauh dari aliran sungai sehingga bebas dari banjir. Kedua, Dusun Sibau Permai wilayahnya terletak di pesisir sungai sehingga apabila curah hujan sangat tinggi wilayah ini mudah untuk dilanda banjir sehingga

menyulitkan warga masyarakat yang tinggal di Dusun Sibau Permai ini, Ketiga Dusun Lingkar Bandara, dusun ini diberi nama lingkar bandara bahwasanya sangat dekat dengan Bandara Nanga Pinoh dusun ini juga sebagian memiliki wilayah dataran rendah sehingga ada beberapa tempat apabila curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir. Keempat, Dusun Kerangan Sibau merupakan wilayah yang berada pada daerah perbukitan sehingga wilayah ini bebas dari banjir dan bencana alam lainnya. Kelima, Dusun Nusa Indah merupakan wilayah yang akses jalannya sudah bagus dan jembatan-jembatan juga sudah di rabat beton sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalani aktifitas kerja masing-masing namun pada RT.012 akses jalan sudah rusak dan wilayah nya juga berdekatan dengan sungai sehingga apabila curah hujan tinggi maka akan mengakibatkan banjir.

Tabel 2. 2 Data Kepala Desa Kenual Menurut Periode

No	Nama	Periode
1.	Anuar	2007-2013
2.	Haji Atot Alamsyah	2013-2019
3.	Rama Tri Putra, A.Md. Kep	2019-2024

Sumber : (Buku Profil Desa) 6 Januari 2022

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat menjelaskan pada saat pemekaran dari Desa Tanjung Niaga maka Kepala Desa yang terpilih untuk menyelenggarakan pemerintah desa adalah Bapak Anuar yang berasal dari Dusun Kerangan Sibau, beliau menjabat satu periode atau 5 tahun untuk memimpin Desa Kenual. Setelah kepemimpinan Anuar, yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Haji Atot Alamsyah dari Dusun Gelora Juang beliau juga menjabat satu periode atau 5 tahun dari 2013-2019. Kemudian, digantikan oleh Rama Tri Putra atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Mantri Paten sebab beliau adalah Mantri Kesehatan yang sering membantu masyarakat Desa Kenual dalam bidang kesehatan.

Pemerintah Desa terdapat orang-orang yang mengisi jabatan yang diorganisasikan di Desa disusun sesuai dengan bidang yang ditentukan masing-masing. Adapun struktur Pemerintah Desa Kenual seperti di bawah ini :

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Tahun 2019-2024

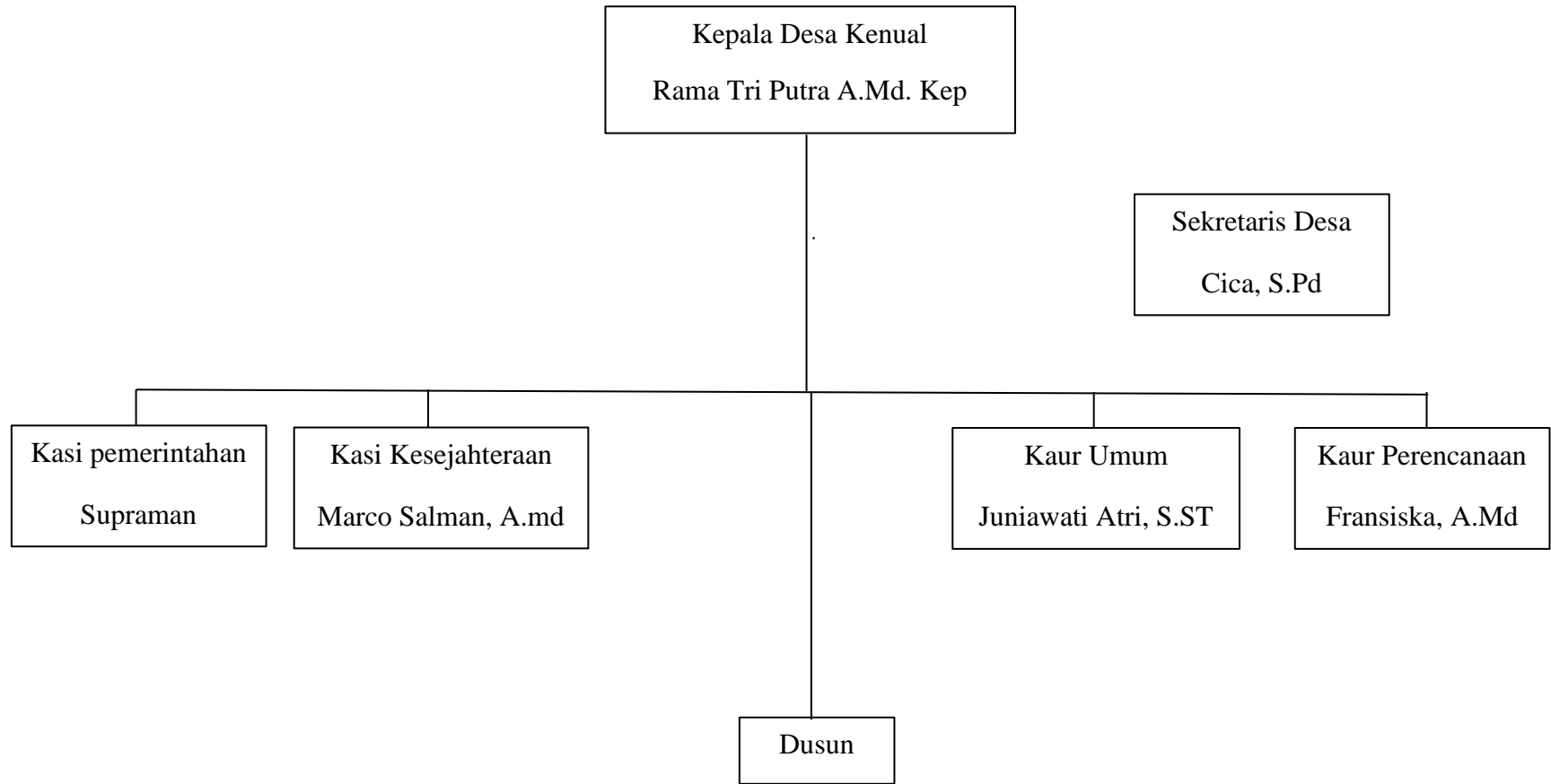
Tabel 2. 3 Tabel Organisasi Pemerintah Desa Kenual

No.	Nama	Jabatan
1.	Rama tri Putra, A.Md. Kep	Kepala Desa Kenual
2.	Cica, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	Suparman	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Marco Salman, A.Md	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
5.	Juniawati Atri, S.ST	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
6.	Fransiska, A. Md	Kepala Urusan dan Keuangan
7.	Hendri Kurniawan	Dusun Kerangan Sibau
8.	Riko Hendri	Dusun Gelora Juang
9.	Supratman	Dusun Lingkar Bandara
10.	Helito	Dusun Sibau Permai
11.	Chandra Hadi	Dusun Nusa Indah

Sumber : Kantor Desa Kenual

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan struktur organisasi Pemerintah Desa Kenual yang dipimpin oleh Rama Tri Putera, A.Md. Kep dan pembantu tugas Kepala Desa seperti yang ada pada tabel diatas, jabatan yang dipilih untuk mengisi kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintah sudah melalui proses yang selektif dan dianggap mampu untuk menyelenggarakan pemerintah serta menjadi pelayan publik yang baik.

Struktur Pemerintah Desa Kenual



Tugas dan Fungsi Pemerintah desa Kenual

- Kepala Desa : Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan Desa yang menyelenggarakan pemerintahan atau seorang pemimpin dari wilayah Desa (Melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan kemitraan dengan setiap unsur kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa)
- Sekretaris Desa : Sekretaris Desa merupakan unsur pimpinan untuk membantu Kepala Desa dalam bidang adminisstrasi pemerintah Desa. Contohnya melaksanakan urusan tata usaha seperti surat menyurat terkait desa, tata naskah,arsip kantor, persediaan administrasi kantor, penataan aset, inventaris, perjalanan dinas,pelayanan umum serta administrasi keuangan, administrasi penghasilan dari Kepala Desa,BPD, dan melaksanakan urusan perencanaan,menyusun rencana APBDesa.
- Kepala Seksi Pemerintahan : Kepala Seksi Pemerintahan merupakan unsur staf sekretaris desa dalam membantu mensukseskan program dari desa tersebut dan juga memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi Desa, pelaksanaan kebijakan desa, penyelenggaraan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat desa serta pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat desa.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan merupakan unsur pembantu sekretaris desa dalam Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa, melakukan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat di desa, seperti penyuluhan kesehatan, program imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan kebudayaan di desa, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai program, seperti pengembangan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan ekonomi, menyampaikan informasi kepada masyarakat desa mengenai program-program pemerintah, hak-hak masyarakat,pendataan dan Monitoring, pelaporan dan Evaluasi. Peran Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mereka.

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Bertugas membantu sekretaris Desa dalam melakukan urusan pelayanan administrasi untuk melaksanakan program pendukung pemerintahan (pembuatan rencana APBDes, arsip dan inventaris data-data yang dimiliki Desa dalam rangka pembangunan, melakukan evaluasi sekaligus monitoring

program, penyusunan laporan, pelaksanaan perintah tugas dan fungsi dari sekretaris Desa atau Kepala Desa).

Kepala Urusan dan Keuangan : Bertugas membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas keuangan sekaligus pendukung dari tugas pemerintahan (mengurusi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, administrasi keuangan, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya. Serta perintah tugas dari sekretaris dan Kepala Desa,.

Kepala Dusun : Sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam menjaga wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai tugas dalam menjalankan kegiatan yang diselenggarakan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya (Menjaga ketertiban dan ketentraman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat wilayah kerjanya, pengelolaan dan perencanaan serta memberikan pengawasan terhadap program yang masuk dalam wilayah kerjanya, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menata dan menjaga lingkungannya, dll).

BPD : Bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja Kepala Desa, menjadi penyampaian aspirasi masyarakat desa apabila masyarakat tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Desa.

2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh

Struktur organisasi BPD yang berguna untuk mengawasi kerja dari Kepala Desa Kenual juga sudah dibentuk dan dipilih sesuai dengan pemilihan masyarakat agar menjalani tugas dan Amanah dengan baik, table dibawah menunjukkan beberapa orang yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya :

Tabel 2. 4 Struktur organisasi BPD

No.	Nama	Jabatan
1.	Ujang Parmana	Ketua BPD
2.	Haji Asrun	Wakil Ketua
3.	Ahmadi	Sekretaris
4.	Robi Irwansyah	Anggota 1
5.	Manda	Anggota 2
6.	Sahjohan	Anggota 3
7.	Parlan	Anggota 4
8.	Citra Dewi	Anggota 5

Sumber : Kantor Desa Kenual

Berdasarkan tabel 2.4 juga memaparkan nama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD sebagai ujung tombak dari Pemerintah Desa Kenual yang Dimana bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan Desa Kenual dan juga diberikan Amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar terealisasi tepat sasaran sesuai dengan indikator kebutuhan masyarakat di Desa Kenual.

B. Profil Desa Kenual

1) Luas Wilayah

Secara geografis Desa Kenual adalah salah satu wilayah yang terletak pada 0° 00'750''LS - 110° 28'748''BT dan memiliki luas wilayah ±680 Ha¹ dengan sebagian besar 80 % wilayah digunakan untuk tempat tinggal Masyarakat dan pekarangan dan berbatasan langsung dengan wilayah :

- a. Sebelah utara Desa Kenual berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Niaga yang ditandakan dengan menyeberangi Sungai pinoh dan Sungai melawi, Sungai pinoh disebut dengan nama Sungai serundung yang terletak di Desa Kenual Dusun Nusa Indah, Sungai serundung pada saat musim kemarau sering dijadikan objek wisata bagi Masyarakat setempat bahkan kota Nanga Pinoh karena pada musim kemarau Sungai akan surut dan bebatuan serta pasir membuat Masyarakat setempat dapat berjalan ke dasar Sungai untuk menikmati bahkan bersantai di pesisir Sungai tersebut. Meskipun tidak ada Pantai di wilayah Nanga Pinoh namun Ketika musim kemarau Masyarakat Kabupaten Melawi pasti ramai berkunjung ke Sungai ini karena dasar Sungai yang membentuk bebatuan dan pasir enak digunakan untuk bersantai Bersama teman atau keluarga bahkan dijadikan tempat wisata dan membantu warga menambah penghasilan karena Masyarakat setempat banyak yang membuka warung di pinggir Sungai.
- b. Sebelah Selatan Desa Kenual juga berbatasan dengan Desa Tanjung Lay, Desa Kenual dan Desa Tanjung Lay, batas ditunjukkan langsung dengan perumahan warga Desa Kenual dan rumah warga Desa Tanjung Lay.
- c. Sebelah timur Desa Kenual berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Niaga, sebelah timur ini berbatasan dengan Sungai pinoh dan Sungai melawi, Kedua Sungai ini Ketika musim kemarau dapat menjadi tempat wisata bahwasanya jika air surut maka dasar sungai akan nampak bebatuan dan pasir Sungai sehingga dapat digunakan untuk bersantai dan Masyarakat mandi bersama keluarga.
- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Tengang, perbatasan antara Desa Kenual dan Desa Tanjung Tengang ditunjukkan dengan hutan belantara sebab belum ada perumahan yang dibangun antara kedua Desa ini

namun ada Perkebunan warga Masyarakat seperti karet, buah-buahan peninggalan orang jaman dahulu.

2) Topografi

Jika dilihat secara administratif Desa Kenual juga termasuk dalam wilayah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat tepat terletak pada pusat Kota Nanga Pinoh. Desa Kenual adalah Desa yang mempunyai beberapa topografi seperti wilayah perbukitan, dataran rendah serta tinggi, pesisir sungai dan bantaran sungai.

3) Demografi

Keadaan Demografi merupakan hasil analisis statistic dari jumlah populasi manusia yang mencatat jumlah penduduk, jadi pada dasarnya demografi adalah ilmu pencatatan manusia. Adapun data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat kita lihat pada table di bawah ini :

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kenual

Tabel 2. 5 Data Penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kenual

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	2.319
2.	Perempuan	2.224
Total		4.543

Sumber: (Buku Profil Desa Tahun 2023) 6 Januari 2023

Berdasarkan tabel 2.5 yang diambil dari Buku Profil Desa Tahun 2023, jika dilihat secara demografi jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2023: 1315 KK Jumlah penduduk Desa Kenual ialah 4.543 penduduk dengan jumlah laki-laki 2.319 jiwa dan jumlah Perempuan 2.224 jiwa.. Jika dilihat jumlah kependudukan maka di Kabupaten Melawi bisa dikatakan Desa yang mempunyai jumlah kependudukan yang besar dalam lingkup wilayah Desa.

b. Jumlah penduduk menurut Agama Kepercayaan di Desa Kenual

Desa Kenual merupakan Desa yang memiliki beragam Agama, adapun Agama yang dianut oleh Masyarakat di Desa Kenual yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Masyarakat Desa Kenual walaupun beragam kepercayaan yang dianut atau bisa disebut perbedaan namun saling menghargai. Salah satu contoh yang paling sering dilakukan adalah disaat umat Kristen merayakan natal maka umat yang beragama lain akan membantu dalam keamanan saat mereka beribadah di gereja dan begitu juga sebaliknya apabila muslim merayakan lebaran maka saat shalat bergantian untuk membantu pengamanan sampai acara selesai, begitu juga terhadap agama Hindu, Budha dan Konghucu. Berikut adalah daftar penganut agama yang dipercaya sesuai data yang disajikan di Profil Desa Kenual sesuai dengan jumlah penduduk yaitu :

Tabel 2. 6 Data Masyarakat Desa Kenual menurut Agama Kepercayaan

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah Jiwa
1.	Islam	2.694
2.	Katolik	780
3.	Kristen	874
4.	Hindu	1
5.	Budha	153
6.	Konghucu	41
Jumlah		4.543

Sumber: (Buku Profil Desa tahun 2023) 6 Januari 2023

Berdasarkan tabel 2.6 di atas menunjukkan Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kenual mayoritas yaitu Islam dengan jumlah jiwa 2.694 jiwa, Kristen 874 jiwa, Katolik 780 Jiwa, Budha 153 Jiwa Konghucu 41 Jiwa dan yang paling minoritas yaitu Hindu berjumlah 1 jiwa.

c. Jumlah Menurut Etnis

Jumlah Etnis masyarakat yang diwarisi secara turun temurun dari orang tua dan nenek moyang setiap hidup manusia juga menjadi kajian demografis yang

mencatat dan mengumpulkan data menjadi sebuah kelompok sesuai dengan Etnis yang melekat pada masyarakat Desa Kenual. Berikut merupakan data de,ografi Desa Kenual menurut etnis:

Tabel 2. 7 Data Masyarakat Desa Kenual menurut Etnis

No	Etnis	Jumlah Jiwa
1.	Suku Batak	34
2.	Suku Melayu	2.694
3.	Suku Betawi	25
4.	Suku Jawa	39
5.	Suku Banjar	17
6.	Suku Dayak	1.654
7.	Suku Sasak	23
8.	Suku Papua	19
9.	Suku Tionghoa	38
Jumlah		4.543

Sumber:(Buku Profil Desa) Tahun 2023) 6 Januari 2023

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan kelompok suku yang ada di lingkungan masyarakat Desa Kenual adalah Suku Dayak, Suku Melayu, Suku Batak, Suku Sasak, Suku Papua, Suku Banjar, Suku Jawa dan Suku Cina. Walaupun banyak perbedaan Suku, masyarakat yang tinggal di Desa Kenual sangat toleransi dan menghargai perbedaan suku yang ada di lingkup masyarakat, contoh yang paling umum adalah masing-masing suku dapat menjalankan adat dan tradisi sesuai dengan turunan leluhur dan nenek moyang mereka.

Jika diambil salah satu contohnya pada Suku Dayak selalu mengadakan pesta panen padi yang biasanya di namakan Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan acara yang dilaksanakan setiap tahunnya mulai dari Tingkat desa, kecamatan sampai kepada kabupaten. Tradisi ini sudah dilakukan turun temurun oleh leluhur atau nenek moyang orang Dayak. Pada acara ini biasanya mengucapkan Syukur kepada Jubata (Tuhan dalam sebutan Bahasa Dayak) terhadap hasil panen padi. Biasanya acara ini diadakan pada bulan April dengan diikuti oleh seluruh

masyarakat Dayak khususnya namun juga terbuka untuk suku-suku lainnya agar dapat melihat adat dan budaya orang Dayak yang ada di Kabupaten Melawi.

Selain itu Suku Dayak juga memiliki kebiasaan atau adat istiadat contohnya di dalam adat setelah perkawinan yang dinamakan dengan *menoik* menantu (Bahasa Dayak) tradisi ini dilakukan oleh pihak laki-laki untuk meresmikan pihak Perempuan sebagai keluarga yang telah disatukan melalui pernikahan adat agama. Tradisi ini dilakukan tergantung dengan kesepakatan keluarga besar pihak laki-laki, biasanya tradisi ini dilakukan satu bulan setelah pernikahan namun jika dari pihak laki-laki belum mempersiapkan acaranya maka acara bisa dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak Perempuan maupun laki-laki.

Untuk Suku Tionghoa, biasanya mengadakan festival *cap go meh* keliling untuk memamerkan pakaian dan alat tradisional yang dimiliki Suku Cina, Suku Cina juga mengadakan pertunjukan *tatung* atau manusia kebal terhadap api dan benda tajam, kemudian masyarakat Suku Cina biasanya memainkan *barongsai* atau pada perayaan tahun baru imlek. Acara ini dipercayai salah satu bentuk doa untuk mendapatkan keberuntungan dan mengusir roh jahat. Hal ini juga menciptakan suasana meriah dan membawa kebahagiaan. Suku Melayu biasanya mengadakan penyembelihan qurban yang biasanya dilakukan bertepatan dengan hari raya *idul adha*, tempat mereka melakukan tradisi biasanya di masjid. Namun daging qurban yang disembelih oleh mereka maka akan dibagikan rata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Kenual.

a) Jumlah Masyarakat berdasarkan Mata Pencaharian

Data yang dicatat dalam membantu pemerintah dalam melakukan ekonomi untuk mengidentifikasi sektor-sektor pekerjaan yang paling dominan serta

memberikan pelatihan agar keterampilan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Pekerjaan masyarakat Desa Kenual seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2. 8 Data masyarakat berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani	44
2.	Buruh Tani	7
3.	Pegawai Negeri Sipil	262
4.	Pedagang Barang Kelontong	11
5.	Dokter Swasta	3
6.	Perawat Swasta	2
7.	Bidan Swasta	5
8.	TNI	7
9.	POLRI	13
10.	Guru Swasta	14
11.	Dosen Swasta	1
12.	Tukang Kayu	1
13.	Pembantu Rumah Tangga	1
14.	Karyawan Perusahaan Swasta	60
15.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	9
16.	Wiraswasta	1.219
17.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	11
18.	Belum Bekerja	439
19.	Pelajar	1.445
20.	Ibu Rumah Tangga	880
21.	Purnawirawama/pension	9
22.	Perangkat Desa	3
23.	Buruh Harian Lepas	1
24.	Pemilik Usaha, warung/pensiun	2
25.	Jasa Pengobatan Alternatif	2
26.	Sopir	1
27.	Tukang Anyaman	1
28.	Karyawan Honorer	65
29.	Pemuka Agama	4
30.	Anggota Legislatif	5
31.	Kepala Daerah	1
32.	Apoteker	2
33.	Duta Besar	1
34.	Wakil Bupati	1
Jumlah		4.543

Sumber: (Buku Profil Desa Tahun 2023) 6 Januari 2023

Dilihat berdasarkan tabel 2.8 diatas mengenai jumlah penduduk Desa Kenual yang berdasar kepada jenis mata pencapaian yang diambil dan ditekuni

oleh masyarakat Desa Kenual. Mayoritas masyarakat Desa Kenual adalah Pelajar banyak yang duduk dibangku SD sampai ke Perguruan Tinggi. Kedua, banyak yang berprofesi sebagai wiraswasta dari segala sektor usaha. Ketiga, banyak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja.

b) Jumlah Masyarakat berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara pencatatan Tingkat Pendidikan ini merupakan salah satu ukuran bagaimana minat masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan Pendidikan maka akan dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi masyarakat sebab factor yang paling berpengaruh dalam kemiskinan adalah Pendidikan.

Pencatatan jumlah ini juga memberi tahu berbagai pihak bahwasanya minat sadar masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan sehingga dapat berguna bagi penunjang kehidupan setiap manusia agar mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi serta kehidupan yang layak.

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum Masuk TK (3-6 tahun)	208
2.	TK (3-6 tahun)	51
3.	Sedang Sekolah (7-18 tahun)	1.847
4.	Tidak Pernah Sekolah (18-56 Tahun)	8
5.	Tidak Tamat SD (18-56 tahun)	39
6.	SD	538
7.	SMP	485
8.	SMA	824
9.	D-1	13
10.	D-2	59
11.	D-3	96
12.	S-1	283
13.	S-2	50
14.	S-3	42
Total		4.543

Sumber (Buku Profil Desa tahun 2023) 6 Januari 2023

Berdasarkan tabel 2.9 diatas maka menunjukkan Tingkat Pendidikan di Desa Kenual bisa terbilang baik karena jika dilihat dari jumlah penduduk Desa Kenual 4.543 jiwa dibandingkan dengan jumlah 208 jiwa yang belum masuk TK (3-6 tahun), yang masih menempuh Pendidikan TK 51 jiwa, sedang sekolah (7-18 tahun) 1.847 jiwa, tidak pernah sekolah (18-56 tahun) hanya dengan jumlah 8 orang, tidak tamat SD (18-56 tahun) 39 orang, Pendidikan SD 538 jiwa, SMP 485 jiwa, SMA 824 jiwa, D-1 13 jiwa, D-2 59 jiwa, D-3 96 jiwa, S-1 283 jiwa, S-2 20 jiwa dan S-3 42 orang sehingga jumlah Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Kenual sebanyak 4.543 jiwa. Melihat dari data pencatatan ini menjadikan amunisi Desa Kenual untuk menjadikan Desa yang maju karena table diatas menjadi indikator bahwa banyak orang-orang yang berpendidikan tinggal dan menetap di Desa Kenual.

c) Jumlah masyarakat Penerima bantuan

Masyarakat penerima bantuan adalah kelompok yang mendapatkan bantuan dalam berbagai bentuk dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau organisasi lainnya. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, sosial, atau krisis tertentu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Program BLT biasanya memiliki kriteria tertentu untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Kriteria ini bisa berupa tingkat pendapatan, status sosial ekonomi, atau keterpaparan terhadap risiko tertentu (misalnya, terdampak langsung oleh bencana atau pandemi). Berikut merupakan Jumlah penerima Bantuan di Desa Kenual:

Tabel 2. 10 Jumlah Penerima Bantuan

No	Nama	Alamat	Jumlah Penerima
1.	Paimin. S	Dsn. Kerangan Sibau	Rp. 300.000
2.	Sinlok	Dsn. Kerangan Sibau	Rp. 300.000
3.	Kariyati	Dsn. Kerangan Sibau	Rp. 300.000

4.	Fitriani	Dsn. Kerangan Sibau	Rp. 300.000
5.	Alisyah	Dsn. Kerangan Sibau	Rp. 300.000
6.	Rahul Ramadhan	Dsn. Nusa Indah	Rp. 300.000
7.	Alnidin	Dsn. Gelora Juang	Rp. 300.000
8.	Tjen Djan	Dsn. Gelora Juang	Rp. 300.000
9.	Hambali	Dsn. Gelora Juang	Rp. 300.000
10.	Burhanudin	Dsn. Gelora Juang	Rp. 300.000
11.	Akiat	Dsn. Gelora Juang	Rp. 300.000
12.	Kuntui	Dsn. Gelora Juang	Rp. 300.000
13.	Jhonli Fenli Runtu	Dsn. Lingkar Bandara	Rp. 300.000
14.	Bidai	Dsn. Lingkar Bandara	Rp. 300.000
15.	Selep	Dsn. Lingkar Bandara	Rp. 300.000
16.	Temi	Dsn. Lingkar Bandara	Rp. 300.000

Berdasarkan tabel 2.10 jumlah penerima Bantuan di Desa Kenual berjumlah 16 Kepala Keluarga, dan mendapat bantuan sebesar Rp. 300.000 setiap kepala keluarga. Nama penerima bantuan tersebut merupakan DTKS, ni adalah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial lainnya. DTKS bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat dan efisien. Sistem ini mencakup basis data yang mencatat informasi tentang kondisi ekonomi, sosial, dan demografi rumah tangga penerima bantuan. Data ini digunakan untuk menentukan kelayakan dan jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat yang terdaftar dalam sistem.

Penduduk Desa Kenual menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu. Namun, pemerintah Desa Kenual tidak memberikan data secara spesifik terkait jumlah atau frekuensi bantuan beras yang diberikan oleh PKH tersebut. Desa Kenual hanya menerima dua jenis bantuan dari

pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). PKH memberikan bantuan berupa beras kepada keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan mengurangi beban ekonomi. Sementara itu, BLT merupakan bantuan tunai langsung yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan daya beli keluarga penerima. Dengan terbatasnya jenis bantuan yang diterima, Desa Kenual berfokus pada dua bentuk dukungan ini dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara terperinci dan mendalam bab ini akan menjawab seluruh rumusan masalah yang ada pada bab pertama, tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

A. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan dapat mencakup berbagai langkah, seperti pengembangan infrastruktur dasar, pemberian pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja, penyediaan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan program bantuan sosial dan usaha mikro. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan juga tidak boleh diabaikan.

Untuk mengatasi kemiskinan di desa, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk:

1. Pengembangan infrastruktur: Meningkatkan aksesibilitas desa melalui pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik dapat membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Pemberdayaan ekonomi lokal: Mendukung usaha mikro dan kecil, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja lokal.

3. Pendidikan dan kesehatan: Meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dasar dapat membantu mengurangi kemiskinan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi.
4. Program bantuan sosial yang tepat sasaran: Menerapkan program bantuan yang efektif dan tepat sasaran untuk mendukung keluarga miskin dan rentan.
5. Penyuluhan dan advokasi: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan,
6. pendidikan, dan perencanaan keuangan, serta memberikan akses informasi tentang program bantuan yang tersedia.
7. Kolaborasi antar sektor: Mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan LSM untuk mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.
8. Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program pembangunan dapat memastikan relevansi dan keberlanjutan intervensi tersebut.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kemiskinan di desa dapat diatasi secara efektif. Kebijakan adalah serangkaian prinsip atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Kebijakan biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan, program, atau pedoman yang dirancang untuk mengatasi masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan publik, khususnya, merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan

lingkungan, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan di desa perlu ada kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat desa. Seperti yang disampaikan oleh informan Rama Tri Putra selaku Kepala Desa Kenual yang menyatakan sebagai berikut:

“untuk kebijakan atau peraturan terkait mengurangi angka kemiskinan di desa kita pemerintah desa tidak ada aturan khusus mengenai hal tersebut, kami selaku pemerintah desa hanya mengikuti alur kebijakan dari pusat maupun kabupaten. Namun kami selaku pemerintah desa tetap melakukan hal terbaik untuk desa, dengan tetap menyalurkan bantuan bantuan yang disalurkan langsung dari pusat, seperti BLT dan PKH.” (hasil wawancara pada 2 april 2024)

Kepala Desa Kenual menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang dibuat pemerintah desa dalam pengentasan Kemiskinan desa. Pemerintah Desa hanya Mengikuti Regulasi dari Pusat. Hal tersebut senada juga disampaikan salah satu perangkat Desa Marco Salman selaku Kepala seksi Kesejahteraan dan pelayanan:

“pemerintah Desa mengharapkan yang terbaik untuk masyarakat, memang benar tidak ada kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pengentasan kemiskinan, tapi untuk bantuan bantuan ke masyarakat tidak mampu kami tetap jalankan. Untuk sekarang focus kami memang belum sepenuhnya kepada masyarakatnya, fokus kami sekarang masih besar kepada infrastrukturnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 2 april 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hal ini benar adanya jika tidak ada peraturan khusus yang dibuat Pemerintah Desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Kenual. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum Fokus dalam mensejahterakan masyarakat, mereka hanya mengandalkan bantuan yang diberikan pusat. Penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di desa dapat diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Berikut adalah beberapa cara spesifik yang dapat dilakukan: Pembangunan infrastruktur Desa yang mendukung Ekonomi, program pemberdayaan ekonomi, pertanian dan peternakan, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan pelatihan, Pengelolaan Sumber daya alam, Perlindungan Sosial dan Bantuan Langsung, Akses Teknologi dan Informasi, Serta Pengertian Kelembagaan Desa. Berikut hasil wawancara Bersama kepala Desa mengenai Perencanaan pemerintah desa dalam pengentasan Kemiskinan:

“... terus terang saja untuk sekarang fokus kami pada infrastruktur saja, dan penyaluran bantuan langsung. Untuk program pemerintah desa memang belum ada yang terfokus pada kemiskinan masyarakat. Untuk pendataan masyarakat miskin atau tidak mampu kita juga langsung turun tangan, contohnya yang dapat bantuan, usia yang sudah tidak produktif, dan yang memang ekonominya tidak mapan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dapat diketahui bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya focus dalam kesejahteraan masyarakatnya. Ketika pemerintah desa tidak fokus pada pengentasan kemiskinan, beberapa masalah serius dapat muncul, seperti ketimpangan yang meningkat, stagnasi ekonomi, dan kualitas hidup yang buruk bagi .

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sudah diterapkan hampir seluruh desa di di Indonesia, yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pendidikan Gratis atau Subsidi Pendidikan, Program Kesehatan Gratis atau Subsidi Kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam

perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut relevan dan berdampak positif bagi masyarakat desa yang miskin.

Implementasi program-program dalam pengentasan Kemiskinan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas lokal terpenuhi. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Implementasi kebijakan yang ada bisa dilihat dari hasil wawancara berikut yang disampaikan oleh Ahong selaku penerima bantuan Bantuan Pangan (Bolug) Berikut hasil wawancaranya:

“kami yang menerima bantuan ini biasa di datangi kerumah, contohnya saya menerima bantuan seperti beras bulogg ini, biasanya kalau beras ketua rt yang mendata ke rumah. Kalau untuk kegiatan desa ya paling kalau kerja bakti desa masyarakat ikut, tapi untuk rapat rapat penting banyak masyarakat yang tidak tau program apa saja yang ada di desa bang.”

Hal senada juga disampaikan oleh Mutia Sari selaku penerima Bantuan Langsung Tunai berikut hasil wawancaranya:

“saya penerima BLT 300 ribu perbulannya, tapi untuk kegiatan desa saja jarang tau bang, untuk menerima bantuan juga baru ini. Tapi menurut saya pribadi BLT ini kadang tidak tepat sasaran, karena masih banyak yang kehidupan ekonominya masih mampu, tapi dapat bantuan juga. Masyarakat yang benar benar miskin malah kadang tidak dapat. Jadi banyak masyarakat yang marah.”

Hasil wawancara masyarakat menunjukkan bahwa benar adanya Bantuan pangan maupun langsung Tunai yang ada di desa, namun masyarakat belum terlibat aktif dalam kegiatan kegiatan yang ada di desa. Serta masyarakat juga mengatakan bahwa BLT belum sepenuhnya tepat sasaran.

Pemerintah desa sering kali mengandalkan program pemerintah pusat dan Kementerian Sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) karena beberapa alasan berikut: BLT dan PKH memungkinkan distribusi bantuan secara cepat dan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memerlukan proses perencanaan yang panjang di tingkat desa, Mengandalkan program pusat mengurangi beban administratif pada pemerintah desa, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas lain yang penting, Implementasi program pusat biasanya lebih sederhana dalam hal administrasi bagi desa dibandingkan dengan merancang program baru sendiri. Berikut merupakan hasil wawancara Bersama Fransiska selaku Kepala Urusan dan keuangan:

“untuk saat pemerintah desa sudah menjalankan program bantuan yang dibuat oleh pusat seperti BLT dan PKH, dengan alasan memang tidak ada program dan perdes yang mengatur tentang pengentasan kemiskinan di desa kenual. Ya seperti kita ketahui Desa sering kali mengikuti instruksi dari pemerintah pusat sebagai bagian dari kewajiban administrasi dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan mungkin anggaran yang terbatas juga sehingga memang desa belum berani untuk membuat program kemiskinan sendiri dan jujur saja kami pemerintah desa juga belum berani untuk membuat program pengentasan kemiskinan karena masih kurang pengetahuan dalam memberantas kemiskinan sehingga kami masih mengikuti pusat.” (hasil wawancara pada tanggal 4 april 2024)”.

Dari hasil wawancara pemerintah desa Pemerintah desa mungkin memiliki anggaran yang terbatas dan tidak cukup untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan secara mandiri, serta Aparatur desa mungkin kurang memiliki keahlian atau pengetahuan untuk merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang efektif, kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen program sosial.

Meskipun ada manfaat dalam mengandalkan program pusat, desa juga perlu mengembangkan inisiatif lokal untuk pengentasan kemiskinan agar lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas mereka. Beberapa langkah yang bisa diambil

meliputi: penguatan Kapasitas Desa, kolaborasi dengan LSM dan Swasta, Inovasi Program Lokal, Partisipasi Masyarakat. Dengan mengkombinasikan program nasional dengan inisiatif lokal, desa dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemiskinan di desa dapat berdampak signifikan pada pemerintah desa dalam berbagai aspek. Pemerintah desa mungkin menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara efektif karena sumber daya yang terbatas dan tekanan untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat serta Kemiskinan berpengaruh negatif pada akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, yang berdampak pada kesejahteraan dan masa depan masyarakat desa. Berikut cuplikan wawancara Bersama kepala desa mengenai dampak kemiskinan bagi pemerintah desa.

“tentunya sedikit banyak pasti berdampak untuk kegiatan pemerintahan ya, seperti Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi bisa memicu konflik sosial antarwarga, serta ketidakpuasan terhadap pemerintah desa, Desa yang miskin cenderung lebih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah, yang mungkin tidak selalu cukup atau tepat. Upaya terus-menerus untuk mengatasi kebutuhan mendesak dapat mengalihkan fokus pemerintah desa dari perencanaan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan.”

Hal tersebut senada dengan pernyataan Cica selaku Sekretaris Desa Kenual dalam upaya pemerintah mengatasi kemiskinan di desa kenual:

“kami pemerintah desa juga mendapat dampak negatif dari kemiskinan di desa, karena BLT penerima terbatas tentunya banyak yang iri apabila tidak dapat, padahal kami sudah mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat, dan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”

Dari hasil wawancara tersebut dengan Langkah Langkah yang dilakukan pemerintah desa seharusnya dapat lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengentasan kemiskinan di desa Kenual dapat disimpulkan Bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan belum baik dan kurangnya kebijakan khusus di tingkat desa dapat dianggap sebagai tantangan serius dalam upaya memerangi kemiskinan. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dijadikan kesimpulan; kinerja pemerintah desa yang belum optimal dilihat dari Masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas, dan koordinasi dalam mengatasi kemiskinan di tingkat desa. Kurangnya kebijakan di desa mengenai pengentasan kemiskinan, tidak optimalnya penggunaan dana desa, Penggunaan dana desa belum selalu terfokus pada program-program yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Serta upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah desa dan pihak terkait. Perlu adanya kebijakan yang lebih terfokus, penggunaan dana desa yang lebih efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

B. Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan

Modal sosial merujuk pada sumber daya yang tersedia dalam hubungan antarindividu dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Istilah ini mencakup elemen-elemen seperti dukungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, modal sosial dianggap sebagai faktor yang penting karena dapat memengaruhi keberhasilan program-program pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan sosial. Modal sosial dapat membantu

dalam memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan resiliensi dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik.

Modal sosial dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Oleh karena itu, pembangunan dan pelestarian modal sosial sering kali dianggap penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat. Modal sosial memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di desa karena memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Berikut adalah beberapa cara di mana modal sosial dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan di desa:

1. Gotong Royong dan Kolaborasi: Prinsip gotong royong memungkinkan masyarakat desa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang menguntungkan semua orang, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam, atau usaha-usaha pertanian bersama. Kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat desa terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan.
2. Jaringan Sosial dan Pendukungan: Jaringan sosial yang kuat di desa dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap dukungan ekonomi dan sosial. Misalnya, kelompok-kelompok simpan pinjam atau koperasi dapat membantu masyarakat desa untuk mendapatkan akses terhadap modal usaha atau pinjaman kecil yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Bersama: Masyarakat desa dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk meningkatkan produktivitas

dan pendapatan mereka. Misalnya, program-program pelatihan kewirausahaan atau pertanian yang didukung oleh masyarakat lokal dapat membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang tidak stabil atau subsisten.

4. Kepemimpinan Partisipatif: Kepemimpinan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan berfokus pada kebutuhan sebenarnya masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa memiliki dan berkomitmen terhadap inisiatif-inisiatif pembangunan yang ada.

5. Perencanaan dan Pengelolaan Bersama Sumber Daya: Modal sosial dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola bersama sumber daya alam yang ada di desa, seperti lahan pertanian, hutan, atau air. Dengan mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan, masyarakat dapat meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya penting dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.

Dengan memanfaatkan modal sosial ini secara efektif, masyarakat desa dapat memperkuat ketahanan mereka terhadap kemiskinan dan menciptakan peluang-peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Berikut cuplikan wawancara Bersama Hambali selaku Penerima bantuan Langsung Tunai:

“kami penerima bantuan sosial merasa bantuan yang diterima dari pusat saja sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena jumlahnya sedikit, kami berharap pemerintah bisa membantu kami untuk ikut ambil bagian membuka lapangan kerja baru di desa bang, mungkin bisa kasi pelatihan Bertani yang baik, atau mungkin pelatihan yang berdampak positif untuk kami masyarakat yang tidak sekolah ini.”

Pernyataan tersebut juga senanda dengan Anwar selaku penerima bantuan langsung tunai, untuk mempertahankan ketahanan pangan, modal sosial yang perlu dikembangkan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi tantangan kemiskinan, meningkatkan produksi pangan, dan memperkuat modal sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

“bersyukur juga dapat BLT tapi yang saya harapkan juga bantuan dari pemerintah desa, mungkin tidak berupa uang tapi bentuk pelatihan, karena kami sulit mendapatkan lapangan pekerjaan karena tidak memiliki Pendidikan.” (hasil wawancara pada tanggal 6 april 2024).”

Dari hasil wawancara Bersama masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengharapkan da bantuan yang diberikan pemerintah Desa berupa pelatihan khusus guna mempertahankan ketahanan pangan masyarakat, modal sosial yang berupa pelatihan khusus untuk mengembangkan usaha maupun pertanian mengingat tingkat Pendidikan masyarakat yang kurang memadai untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.

Pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat (BLT) dapat dikombinasikan dengan penguatan modal sosial untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan di desa, Contohnya Mengadakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan bagi penerima BLT untuk membantu mereka mengelola dana tersebut secara bijaksana, seperti menabung atau menginvestasikannya dalam usaha produktif. Melalui pendekatan ini, pemberian BLT dapat menjadi lebih dari sekadar bantuan langsung, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat modal sosial dalam masyarakat desa. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan

berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut hasil wawancara Bersama kepala desa:

“untuk pelatihan dalam pemanfaatan BLT belum pernah dilakukan di desa, tapi kami pernah melakukan sosialisasi terkait penggunaan BLT, yang kadarnya dalam sosialisasi kami mengatakan bahwa BLT bukan untuk hura hura tapi untuk membantu kebutuhan masyarakat, dalam hal ini yang kami harapkan masyarakat bisa mengembang BLT tersebut untuk kebutuhan pekerjaan seperti mungkin beli pupuk sehingga karet atau lading masyarakat panennya banyak.”

Dari hasil wawancara Bersama kepala desa dapat disimpulkan bahwa memang belum pernah ada pelatihan khusus penggunaan BLT sehingga BLT tersebut tepat sasaran penggunaannya, Penting untuk dipahami bahwa dampak dari penyaluran BLT dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang cermat sangat penting untuk memastikan bahwa BLT memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Modal sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun fokus pada pembangunan infrastruktur tampak dominan, pemerintah desa juga harus memperhatikan pengembangan modal sosial seperti memperkuat jaringan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan di antara warga desa. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berikut hasil wawancara Bersama Supraman selaku Kepala Seksi pemerintahan:

“fokus kami saat kepada infrastruktur bukan tanpa alasan, karena memang kondisi jalan di desa kenual ini tergolong jelek sebagai desa yang terletak ditengah Kota, sehingga akses untuk ekonomi masyarakat juga berpengaruh. Dan masyarakat juga sering kali menilai kinerja kami dari pembangunan fisik

seperti jalan, irigasi. Sehingga untuk sekarang focus utama kami masih besar pada infrastruktur.

Dari hasil wawancara tersebut Dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dianggap sebagai faktor pendukung utama dalam pembangunan ekonomi lokal, karena dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas pasar, dan daya saing produk lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai modal sosial untuk ketahanan pangan guna pengentasan kemiskinan di desa kenual dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kurang efektif dalam pengembangan modal sosial karena hanya fokus pada satu aspek, yaitu infrastruktur dan bantuan sosial, dapat dijabarkan sebagai berikut: Pemerintah desa cenderung hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial tanpa memperhatikan aspek-aspek modal sosial yang lain, seperti pembangunan jaringan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat. Serta Fokus yang berlebihan pada infrastruktur dan bantuan sosial dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan, di mana aspek-aspek penting dari modal sosial seperti kepercayaan, norma sosial, dan partisipasi terabaikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya fokus penelitian pada kapasitas pemerintah Desa dalam Pengentasan kemiskinan di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah desa di Desa Kenual sudah berusaha dengan memberikan bantuan seperti PKH dan BLT untuk mengatasi kemiskinan. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil. Masih ada kekurangan dalam hal alokasi dana dan fokus pada program-program yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, perlu ada perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar bantuan yang diberikan lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

2. Modal Sosial Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Modal sosial di Desa Kenual, seperti gotong royong dan kearifan lokal, merupakan aset berharga dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun potensi ini ada, penggunaannya belum maksimal karena keterbatasan akses ke pendidikan dan peluang ekonomi. Memperkuat modal sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung program-program lokal dapat membantu mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan membuat dampak dari kebijakan yang ada lebih signifikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang kapasitas pemerintah Desa dalam Pengentasan kemiskinan di desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, kabupaten Melawi, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah desa sebaiknya mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada, terutama dalam hal alokasi dana dan fokus program. Ada baiknya membuat rencana yang lebih jelas dan terarah agar bantuan seperti PKH dan BLT benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penting untuk menambahkan program-program yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan bantuan sementara.

2. Untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Modal Sosial Secara Optimal

Desa Kenual memiliki kekuatan dalam bentuk gotong royong dan kearifan lokal yang sangat berharga. Pemerintah desa perlu lebih mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan juga sangat penting untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih berdaya dan berkontribusi lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta memperkuat hubungan sosial di desa.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL dan SKRIPSI

- Anneli Milèn. 2001. What Do We Know About Capacity Building? An Overview of existing knowledge and good practice. Geneva: *Department of Health Service Provision WHO*.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Arry, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 17(2), 91-96.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1).
- Fauzi, L. M. (2016). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2).
- Irwandi, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 93-103.
- Linda, I. (2019). Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 231-240.
- Purwanto, E.a., dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan ke 1, Gava Media, Yogyakarta.
- Ravalion, Martin and Shaohua Chen. (2007). China's (Uneven) Progress Against Poverty. *Journal Of Development Economics*, 82 (1), pp 1-42.
- Ravalion, Martin. (2001). Growth, inequality dan Poverty: Looking Beyond Averages, *World Development*, 29 (11), pp1803-1815.
- Ritwik Sasmal, J.S (2016). Public expenditure, economic growth and poverty alleviation. *Internasional Journal Of Social Economics*, Vol.43(Issue:6), pp.pp.604-618.
- Sitepu, W. A. R. B. (2022). Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(1), 35-43.
- Soeprapto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1).
- Soeprapto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1).
- Sumbayak, S. O., Waani, J. O., & Tungka, A. E. (2021). *Perencanaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi Kasus: Desa Marbun Toruan, Desa Pearung dan Desa Tipang)*. *SPASIAL*, 8(3), 351-366.

Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22.

Tatik Mariyanti, Akhmad Affandi Mahfudz. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Emperical evidence from Indonesia. *Humanomies*, Vol.32(Issue:3),pp.275-299.

BUKU

Abe, Alexder, 2002, *Perencanaan daerah partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo
Moleong, L. J. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Simamora, 2006. *Perencanaan Pembangunan*, Sinar harapan, Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sutoro,Eko. 2005. *Memperkuat Kapasitas dan Kemandirian Desa*. Yogyakarta: IRE

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

INTERNET

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (n.d.). Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Badan Pemeriksa Keuangan. <https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-kabupaten-melawi/>. Diakses pada Juli 27, 2024.

Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> . Diakses pada 27 Juli 2024.

Wikipedia. (2024, Juli 25). Kabupaten Melawi. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Melawi#:~:text=Kabupaten%20Melawi%20adalah%20sebuah%20kabupaten,Sungai%20Melawi%20dan%20Sungai%20Pinoh. Diakses pada Juli 27, 2024.

RINGKASAN DATA

Jenis Data	Kegunaan Dalam Analisis	Tahapan Dan Teknik Pencarian Data
Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau kondisi tentang penelitian yang diambil 2. Memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu 3. Melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan dengan informan, dengan data yang sudah didapatkan saat observasi 2. Memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan dalam panduan wawancara (dilakukan tanya jawab dengan informan) 3. Mencatat dan merekam informasi yang disampaikan oleh informan.
Observasi	Untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diambil dalam penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengamatan guna untuk melihat kondisi empiris pada objek penelitian. 2. Melakukan pencatatan terhadap kondisi perilaku objek maupun subjek pada penelitian.
Dokumentasi	Untuk menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen serta dapat menjadi acuan jika terjadi perbedaan antara informasi satu dengan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta dokumen jumlah penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Meminta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGETASAN
KEMISKINAN DI DESA KENUAL, KECAMATAN NANGA PINOH,
KABUPATEN MELAWI
(Penelitian di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi)

Identitas informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengetasan Kemiskinan

Panduan Wawancara Fokus 1 (Untuk Pemerintah Desa Kenual)

1. Bagaimana cara pemerintah desa menyikapi kemiskinan yang membuat masyarakat menderita ?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah desa dalam pengetasan kemiskinan ?
3. Bagaimana perencanaan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa untuk pengetasan kemiskinan?
4. Bagaimana cara pemerintah desa mendata penduduk yang miskin ?

5. Mengapa pemerintah desa hanya mengandalkan program pemerintah pusat dan kementerian sosial seperti Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan saja?
6. Bagaimana dengan dana desa cukupkah untuk mengatasi kemiskinan ?
7. Mengapa kemiskinan dalam masyarakat menjadi salah satu masalah sosial yang dihadapi pemerintah desa ?
8. Bagaimana dampak kemiskinan bagi pemerintah desa kenual?
9. Mengapa masyarakat miskin di desa kenual sulit untuk keluar dari kemiskinan ?
10. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan struktural di masyarakat ?

B. Modal Sosial

Panduan Wawancara Fokus 2 (Untuk Masyarakat)

1. Bagaimana pemerintah desa dalam menyikapi kemiskinan yang ada di Desa Kenual ?
2. Bagaimana modal sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ?
3. Bagaimana modal sosial masyarakat terhadap pemberian bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan ?
4. Bagaimana dengan pemberian bantuan Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan ?
5. Bagaimana dampak dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan ?
6. Bagaimana tingkat kepercayaan terhadap penyaluran bantuan tersebut ?
7. Bagaimana kepercayaan sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan ?

8. Mengapa pemerintah desa hanya fokus pada infrastruktur sehingga mengabaikan kesejahteraan yang mengakibatkan kemiskinan ?
9. Mengapa modal sosial sangat penting untuk mensukseskan segala kegiatan pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan dalam aspek pembangunan ?
10. Bagaimana cara masyarakat bertahan hidup dengan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah ?

LAMPIRAN FOTO



SURAT PENUNJUK DOSEN PEMBIMBING



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020)

Alamat : Jl. Tjimojo No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 059/PEM/J/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Jhon Etda Sabjanoba
No. Mahasiswa : 20520119
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 18 Oktober 2023
Judul Proposal : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penentuan Prioritas Progam
Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawai

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Agel Samaloisa

SURAT PENELITIAN DARI PEMERINTAH DESA KENUAL



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH
KANTOR KEPALA DESA KENUAL
Jalan. Drs. Soeparjan No. Kode Pos 78672

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140 / 01 / KNL / 2024


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi, dengan ini menerangkan bahwa, JHON ETDA SABJANOBA dengan Nomor 20520119 Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD " Yogyakarta tentang Penelitian Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dari tanggal 12 Febuari tahun 2024.

Bahwa yang namanya JHON ETDA SABJANOBA dengan Nomor 20520119 benar mengadakan penelitian di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMBAHAGIAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBAHAGIAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 874/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Di Tempat


Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 11 Desember 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Jhon Etida Sabjanoba
No Mhs : 20520119
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Tempat : Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2023
Ketua

Dosen Pembimbing
NiY. 170 230 190



CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner